

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan Dinas Sosial Kota Surabaya :

Konstruksi sosial

Apakah Dinas Sosial Kota Surabaya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota ini?

Relativitas yang terikat

Apakah Pemerintah Kota Surabaya selain memberikan BLT juga mengadakan program pelatihan seperti padat karya untuk mengurangi angka kemiskinan?

Elemen – elemen yang terstruktur

Siapa saja petugas lapangan atau *stakeholder* yang dilibatkan dalam pelaksanaan BLT?

Level analisis

1. Mikro

Apakah melalui BLT dan Program Padat Karya yang diberikan sudah bisa membawa kehidupan Masyarakat ke arah Sejahtera dan kemiskinan menurun?

2. Meso

Apakah pelaksanaan BLT di Kota Surabaya sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat?

3. Makro

a. Siapa saja yang berhak menerima BLT?

b. Apakah sudah ada data penerima BLT dari pusat atau dilakukan dengan penunjukan oleh pengurus RT/RW terlebih dahulu?

Pedoman wawancara dengan Kelurahan dan Pengurus RT / RW :

Konstruksi Sosial

1. Jika bapak/ibu melihat respon masyarakat ketika mengetahui ada BLT yang disalurkan apakah mereka sangat antusias dan bergantung pada bantuan ini?
2. Bagaimana cara mensosialisasikan dan membangun pola pikir Masyarakat jika ada yang protes mengenai BLT yang disalurkan?

Relativitas yang terikat

Apakah masyarakat lebih membutuhkan BLT atau program pemberdayaan yang lain seperti padat karya?

Elemen – elemen yang terstruktur

Apakah pihak Kelurahan Klampis Ngasem serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan BLT ini?

Level analisis

1. Mikro

Apakah pemerintah dan masyarakat sudah saling bekerja dalam pelaksanaan BLT sama agar angka kemiskinan menurun?
2. Meso
 - a. Apakah pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat?
 - b. Apakah sebelumnya sudah mengetahui dan tersosialisasikan mengenai BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota ini?
3. Makro
 - a. Apakah penerima BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota?
 - b. Menurut bapak/ibu, apakah data penerima BLT yang dimiliki Dinas Sosial sudah sesuai sasaran?

Pedoman wawancara dengan Penerima Manfaat :

Konstruksi Sosial

Apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui mengenai BLT dari Pemerintah Kota ini?

Relativitas yang terikat

Apakah bapak/ibu lebih membutuhkan BLT atau Program Padat Karya?

Elemen – elemen yang terstruktur

Apakah prosedur pengambilan BLT mudah dan petugas membantu bapak/ibu dalam penarikan dana bantuan?

Level Analisis

1. Mikro
 - a. Apakah BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Kota saat ini sudah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?
 - b. Kebijakan BLT ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan, selain itu seperti yang kita ketahui pemerintah juga berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Apakah bapak/ibu akan memanfaatkan BLT untuk pemenuhan gizi keluarga sebagai support terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau ada kebutuhan lain yang lebih penting selain pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang?
2. Meso

Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur penetapan anda sebagai penerima BLT?
3. Makro

Apa tanggapan bapak/ibu ketika mengetahui penerima BLT yang lain tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya?

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Anisya Sofiantin
 Instansi : Dinas Sosial Kota Surabaya
 Lokasi : Jl. Arief Rahman Hakim No. 131 – 133, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 27 Maret 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi bu. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota.”

Narasumber : *“Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah ada surat penelitiannya kan ya?”*

Peneliti : “Sudah ada bu, ada di Mas Andi. Saya langsung diarahkan untuk menemui ibu.”

Narasumber : *“Oh iya mbak, silahkan bisa dimulai. Apa yang mau ditanyakan?”*

Peneliti : “Jadi begini bu, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Apakah Dinas Sosial Kota Surabaya sudah mensosialisasikan kepada Masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota ini?”

Narasumber : *“BLT ini sudah disampaikan kepada camat lurah dengan harapan mereka dapat menyampaikan kepada RT/RW nya. Dengan adanya bantuan ini dari RT, RW, Lurah juga bisa memberikan edukasi kepada mereka yang menerima dan menjelaskan bahwa bantuan ini sifatnya sementara atau tidak seumur hidup.”*

Peneliti : “Apakah Pemerintah Kota Surabaya selain memberikan BLT juga mengadakan program pelatihan seperti padat karya untuk mengurangi angka kemiskinan?”

Narasumber : *“Selain memberikan beberapa bantuan seperti BLT ini, Pemerintah Kota Surabaya juga mengimbangi dengan adanya Program Padat Karya yang memfasilitasi agar mereka bisa membuka usaha sendiri dengan minat dan bakatnya. Mereka*

- membutuhkan pelatihan untuk pekerjaan tertentu seperti menjahit, cuci AC, dan lain sebagainya.”*
- Peneliti : *”Siapa saja petugas lapangan atau stakeloder yang dilibatkan dalam pelaksanaan BLT?”*
- Narasumber : *”Stakeholder yang terlibat mulai dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, kader – kader KSH (Kader Surabaya Hebat) yang mengedukasi hidup sehat, dan tentunya Bank Jatim sebagai bank pembantu dalam penyaluran dana.”*
- Peneliti : *”Apakah melalui BLT dan Program Padat Karya yang diberikan sudah bisa membawa kehidupan Masyarakat ke arah Sejahtera dan kemiskinan menurun?”*
- Narasumber : *”Tentunya dari kelurahan juga harus sudah menilai dan mengevaluasi mereka yang menerima manfaat dari adanya BLT maupun padat karya itu sudah sejahtera atau belum. Jadi dari RT/RW, kelurahan sebagai aparat terdekat harus turun tangan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai tujuan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan ini.”*
- Peneliti : *”Apakah pelaksanaan BLT di Kota Surabaya sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat?”*
- Narasumber : *”Pelaksanaan bantuan langsung tunai ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, karena memang dalam rangka mengurangi kemiskinan di semua wilayah kabupaten/kota. Kota Surabaya sendiri usaha untuk mengurangi kemiskinan tersebut tidak hanya melalui BLT tetapi juga dengan mengadakan Program Padat Karya. Kita juga mengimbangi program dari pusat, sehingga mengurangi timbulnya kesenjangan antar masyarakat.”*
- Peneliti : *”Siapa saja yang berhak menerima BLT?”*
- Narasumber : *”Penerima BLT adalah keluarga yang masuk ke dalam data keluarga miskin dan belum menerima bantuan sama sekali.”*
- Peneliti : *”Apakah sudah ada data penerima BLT dari pusat atau dilakukan dengan penunjukan oleh pengurus RT/RW terlebih dahulu?”*
- Narasumber : *”Kebetulan Kota Surabaya punya aplikasi Si Keluarga Miskin, dan data keluarga yang masuk ke dalam aplikasi ini sudah kita usulkan ke pusat menjadi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi data Kementerian Sosial. Dan perwali kita untuk keluarga miskin diusulkan mulai tingkat RT, diverifikasi RW, diverifikasi kelurahan, diverifikasi*

kecamatan, lalu Dinas Sosial melakukan survey, baru dimasukkan ke dalam aplikasi Si Keluarga Miskin apakah masuk dan sesuai kriteria, terakhir ada perumusan PMT dan dari perumusan itu akan muncul keluarga tersebut masuk ke dalam keluarga miskin atau tidak. Rumus itu juga sudah ditanamkan di dalam aplikasi Si Keluarga Miskin.”

- Peneliti : ”Oh jadi begitu ya bu, mungkin cukup itu saja bu yang ingin saya tanyakan. Terimakasih bu, mohon maaf mengganggu waktunya.”
- Narasumber : ”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama. Sukses ya.”

Nama : Moch. Fajar Fanani
 Instansi : Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya
 Lokasi : Jl. Arief Rahman Hakim No.103C, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 28 Maret 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi pak. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem.”

Narasumber : *“Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah ada surat penelitiannya?”*

Peneliti : “Sudah, ini pak permisi untuk suratnya.”

Narasumber : *“Oh iya mbak, silahkan bisa dimulai. Apa yang mau ditanyakan?”*

Peneliti : “Jadi begini pak, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jika bapak/ibu melihat respon masyarakat ketika mengetahui ada BLT yang disalurkan apakah mereka sangat antusias dan bergantung pada bantuan ini?”

Narasumber : *”Masyarakat ketika mengetahui ada bantuan seperti BLT ini mereka sangat senang dan antusias sekali, tetapi jika dilihat arahnya lebih ke konsumtif. Selain memang untuk kebutuhan pokok mereka mempergunakan bantuan itu untuk kebutuhan lainnya.”*

Peneliti : “Bagaimana cara mensosialisasikan dan membangun pola pikir masyarakat jika ada yang protes mengenai BLT yang disalurkan?”

Narasumber : *”Biasanya dari Kelurahan setiap ada pembagian bantuan disini selalu memberikan sosialisasi bantuan apa yang sedang diberikan dan dikhususkan untuk siapa saja. Kalaupun akan ada bantuan – bantuan yang lain, Kelurahan selalu memberitahukan pada pengurus RT / RW untuk menyampaikan pada warganya. Kalau selama ini yang kami rasakan dari pihak Kelurahan memang tidak ada yang protes ke kami secara langsung ya mungkin karena takut atau sungkan, tidak tahu lagi kalau di luar pengetahuan kami mereka banyak protesnya.”*

Peneliti : “Apakah masyarakat lebih membutuhkan BLT atau program pemberdayaan yang lain seperti padat karya?”

- Narasumber : *”Kalau dalam waktu singkat atau jangka pendek mungkin bantuan seperti BLT ini sangat berguna karena memang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka, sedangkan untuk jangka panjang memang seharusnya perlu adanya program – program yang bisa memberdayakan masyarakat agar bisa menghasilkan pendapatan sendiri atau mendapat tambahan penghasilan sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.”*
- Peneliti : *“Apakah pihak Kelurahan Klampis Ngasem serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan BLT ini?”*
”Dari pihak Kelurahan serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan karena memang stakeholder yang terlibat tentunya RT, RW, KSH (Kader Surabaya Hebat), petugas penyalur BLT ada yang dari kantor pos maupun bank jatim yang langsung menyalurkan dana bantuan ke masyarakat. Selain itu kita dari Kelurahan juga memfasilitasi tempat kalau memang dipinjam atau digunakan untuk penyaluran dan membantu mengatur warga agar lebih tertib dan teratur saat penyaluran.”
- Narasumber : *”Apakah pemerintah dan Masyarakat sudah saling bekerja dalam pelaksanaan BLT sama agar angka kemiskinan menurun?”*
” Jika tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dengan BLT saja menurut saya itu tidak akan tercapai karena itu hanya untuk membantu kebutuhan pokok sehari – hari, yang utama sebenarnya ke pemberdayaan masyarakat sendiri untuk mengentaskan pengangguran. Untuk pengentasan kemiskinan dengan mengurangi pengangguran sudah kita tawarkan ke masyarakat dengan Program Padat Karya yang beragam jenis pelatihannya, terus ada bantuan modal usaha seperti rombongan buat jualan, tetapi jika dilihat dari masyarakatnya bisa dikatakan sulit diarahkan kesitu dan belum bisa diajak untuk bekerja sama.”
- Peneliti : *”Apakah pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat?”*
- Narasumber : *”Pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sendiri bisa dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemkot dan Pusat karena berdasarkan data dari sana, kita tinggal meneruskan kepada penerima yang bersangkutan untuk diberikan BLT.”*

- Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah mengetahui dan tersosialisasikan mengenai BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota ini?”
”Perihal BLT Pemerintah Kota yang berlaku sejak awal tahun 2024 yang disalurkan mulai bulan Januari sudah berjalan. Tetapi mengenai hal ini dari Dinas Sosial, Kelurahan kurang mengetahui. Jadi kita dari kelurahan hanya menyampaikan ke warga secara umum saja, bahwa nanti semua akan mendapatkan bantuan secara merata termasuk dari Kemensos maupun Pemerintah Kota Surabaya sendiri supaya tidak ada yang mendapatkan bantuan ganda.”
- Narasumber :
- Peneliti : ”Apakah penerima BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota?”
”Penerima BLT kalau dilihat dari minimnya laporan dari sesama warga, maupun RT/RW serasa sudah tepat dan sesuai kriteria. Sudah ada datanya dari Pemkot maupun pusat, seharusnya sudah valid.”
- Narasumber :
- Peneliti : “Menurut bapak/ibu, apakah data penerima BLT yang dimiliki Dinas Sosial sudah sesuai sasaran?”
“Jika saya lihat dan pantau ya, lebih banyaknya sudah tepat sasaran. Mungkin ke depannya data penerimanya dapat terus diperbarui untuk menanggulangi dan mencegah kembali terjadinya permasalahan bantuan tidak tepat sasaran.”
- Narasumber :
- Peneliti : ”Oh jadi begitu ya pak, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih pak, mohon maaf mengganggu waktunya.”
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama. Sukses ya.”*

Nama : Sriyanto
 Instansi : Pengurus RW
 Lokasi : Jl. Klampis Ngasem II No. 6, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 3 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi pak. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem.”

Narasumber : *“Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah ada surat penelitiannya?”*

Peneliti : “Sudah, ini pak permisi untuk suratnya.”

Narasumber : *“Oh iya mbak, silahkan bisa dimulai. Apa yang mau ditanyakan?”*

Peneliti : “Jadi begini pak, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jika bapak/ibu melihat respon masyarakat ketika mengetahui ada BLT yang disalurkan apakah mereka sangat antusias dan bergantung pada bantuan ini?”

Narasumber : *“Kalau ada bantuan apapun apalagi dalam bentuk tunai jelas mereka sangat bergantung. Mereka yang menerima merasa puas dan senang.”*

Peneliti : “Bagaimana cara mensosialisasikan dan membangun pola pikir masyarakat jika ada yang protes mengenai BLT yang disalurkan?”

Narasumber : *“Saya kepada masyarakat berusaha untuk memberikan pengertian dan mengusulkan mereka yang belum mendapatkan bantuan. Jika ada masyarakat protes yang awalnya mendapat bantuan sekarang sudah tidak, atau ada yang sudah diusulkan tetapi tetap belum mendapatkan bantuan ya saya berikan pemahaman mungkin penilaian dari Dinas Sosial taraf hidup mereka sudah mengalami peningkatan dan keluar dari zona kemiskinan.”*

Peneliti : “Apakah masyarakat lebih membutuhkan BLT atau program pemberdayaan yang lain seperti padat karya?”

Narasumber : *“Program pemberdayaan yang lain seperti padat karya sudah ditawarkan kepada masyarakat yang sebenarnya juga dibutuhkan, ada beberapa macam pelatihan yang bisa mereka*

- ikuti. Tapi mereka sangat sulit untuk diajak mengikuti pelatihan – pelatihan seperti itu dengan berbagai macam alasan.”*
- Peneliti : “Apakah pihak Kelurahan Klampis Ngasem serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan BLT ini?”
- Narasumber : *”Kita dari RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan penyaluran BLT, termasuk kader – kader KSH. Mereka sangat membantu dan menjadi kacamata terdepan dari RT/RW karena mereka yang terjun langsung ke masyarakat dan sangat tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kita sangat terbantu sekali dengan adanya KSH ini.”*
- Peneliti : “Apakah pemerintah dan Masyarakat sudah saling bekerja dalam pelaksanaan BLT sama agar angka kemiskinan menurun?”
- Narasumber : *”Kita sebagai pengurus selalu berusaha memberikan dukungan dan pemahaman kepada mereka mengenai kehidupan yang lebih sejahtera dan lepas dari bantuan – bantuan. Namun, sebagian besar masyarakat itu sulit untuk menerima motivasi seperti itu karena sudah ketergantungan dengan bantuan – bantuan yang diberikan. Jika dikatakan saling bekerja sama saya rasa belum.”*
- Peneliti : “Apakah pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat?”
- Narasumber : *”Pelaksanaan BLT disini bisa dikatakan sudah sesuai dengan Pemkot dan Pusat karena memang datanya sudah ada dari sana, meskipun terkadang ada data yang tidak sesuai di lapangan yang diharuskan untuk pendataan ulang dengan bagitu meminimalisir untuk mereka mendapatkan bantuan ganda.”*
- Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah mengetahui dan tersosialisasikan mengenai BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota ini?”
- Narasumber : *”Mengenai BLT dari Dinas Sosial maupun Kelurahan tidak memberitahukan atau mensosialisasikan secara langsung ke pengurus RT/RW. Sebagai pengurus RW mengetahui BLT hanya secara umum dan intinya saja.”*
- Peneliti : “Apakah penerima BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota?”
- Narasumber : *”Menurut saya banyak yang sudah sesuai meskipun ada juga yang tidak sesuai kriteria, karena kadang saya berusaha memasukkan yang kita lihat bersama kondisi di lapangan sangat membutuhkan tetapi ketika ada undangan bukan nama – nama*

yang diajukan yang mendapat undangan jadi memang sulit sekali. Pendataannya kan memang dari Dinas Sosial, jadi dibedakan antara miskin pra miskin, dan sangat miskin (prioritas).”

- Peneliti : “Menurut bapak/ibu, apakah data penerima BLT yang dimiliki Dinas Sosial sudah sesuai sasaran?”
- Narasumber : *“Kita dari pihak RW hanya mengusulkan saja, kita tidak tahu kriteria penerima yang ditetapkan oleh Dinas Sosial itu seperti apa. Makanya terkadang saya juga heran kenapa masih ada yang belum tepat sasaran. Mereka yang benar – benar membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan.”*
- Peneliti : “Oh jadi begitu ya pak, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih pak, mohon maaf mengganggu waktunya.”
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama. Sukses ya.”*

Nama : Zainal Abidin
 Instansi : Pengurus RW
 Lokasi : Jl. Klampis Ngasem No. 115F, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 15 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat sore pak. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem.”

Narasumber : *“Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah ada surat penelitiannya?”*

Peneliti : “Sudah, ini pak permisi untuk suratnya.”

Narasumber : *“Oh iya mbak, silahkan bisa dimulai. Apa yang mau ditanyakan?”*

Peneliti : “Jadi begini pak, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jika bapak/ibu melihat respon masyarakat ketika mengetahui ada BLT yang disalurkan apakah mereka sangat antusias dan bergantung pada bantuan ini?”

Narasumber : *“Tentu mereka menyambut dengan sangat antusias. Dan ketika diberikan bantuan, tidak hanya BLT saja tetapi juga bantuan – bantuan yang lain mereka pasti bergantung dan mengharapkan bantuan tersebut selalu mereka terima.”*

Peneliti : “Bagaimana cara mensosialisasikan dan membangun pola pikir masyarakat jika ada yang protes mengenai BLT yang disalurkan?”

Narasumber : *“Ketika ada warga yang protes saya jelaskan sesuai dengan yang saya ketahui, bahwa pihak RT maupun RW memang mengusulkan tetapi tidak ikut serta ambil keputusan siapa saja yang berhak menerima.”*

Peneliti : “Apakah masyarakat lebih membutuhkan BLT atau program pemberdayaan yang lain seperti padat karya?”

Narasumber : *“Untuk BLT sebenarnya pada dasarnya mereka membutuhkan untuk membantu kebutuhan sehari – hari tergantung bagaimana mereka menggunakan dana tersebut. Kalau pemberdayaan seperti padat karya itu kan melatih skill mereka, itu harusnya sangat dibutuhkan sekali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.”*

- Peneliti : “Apakah pihak Kelurahan Klampis Ngasem serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan BLT ini?”
- Narasumber : *”Menurut saya dari RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan penyaluran BLT ini. Karena jika ada perintah masuk dari Kelurahan/Kecamatan/Dinas Sosial kita siap membantu. Ada kader – kader KSH juga yang membantu kita.”*
- Peneliti : “Apakah pemerintah dan Masyarakat sudah saling bekerja dalam pelaksanaan BLT sama agar angka kemiskinan menurun?”
- Narasumber : *”Jika dilihat dari sisi masyarakatnya sendiri itu juga memang sulit diajak kerjasama agar angka kemiskinan menurun. Karena mereka sudah ketergantungan dengan bantuan yang ada. Jadi memang tidak ada kemauan untuk lepas dari bantuan atau mandiri gitu satu pun tidak ada sama sekali.”*
- Peneliti : “Apakah pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat?”
- Narasumber : *”Menurut saya sudah sesuai ya. Karena selalu dari pengurus RT maupun RW hanya mengikuti arahan dari atas saja.”*
- Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah mengetahui dan tersosialisasikan mengenai BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota ini?”
- Narasumber : *”Saya hanya sedikit mengetahui saja dan belum ada sosialisasi langsung dari kelurahan mengenai BLT Pemerintah Kota ini.”*
- Peneliti : “Apakah penerima BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota?”
- Narasumber : *”Jika berbicara mengenai kriteria, ada yang sudah sesuai ada yang belum sesuai. Kita mengusulkan beberapa nama yang sudah kita nilai bersama bahwa ia layak untuk menerima, ketika undangan turun jika nama – nama tersebut mendapat undangan ya memang sudah bisa dikatakan sesuai tetapi jika di luar nama – nama tersebut yang mendapat dan dilihat masih mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari – hari ya itu yang tidak sesuai.”*
- Peneliti : “Menurut bapak/ibu, apakah data penerima BLT yang dimiliki Dinas Sosial sudah sesuai sasaran?”
- Narasumber : *”Kenyataannya di lapangan banyak data penerima yang masih double atau ganda, seharusnya didata dan diverifikasi ulang. Jadi menurut saya seharusnya dari Dinas Sosial juga mengadakan sosialisasi mengenai data base penerima bantuan – bantuan itu termasuk BLT baik dari jumlahnya, nama –*

namanya dan hasil surveynya, sinkron tidak dengan kriteria yang seharusnya. Kelurahan dan RT/RW mengikuti agar jika ada laporan meninggal dunia, pindah, dan lainnya bisa direkap secara langsung di satu data yang sama, diberi colour block per RW apa gimana sebenarnya gampang. Dari rekap data terbaru tersebut juga bisa diajukan ke Dinas Sosial untuk kebaruan data mereka.”

- Peneliti : ”Oh jadi begitu ya pak, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih pak, mohon maaf mengganggu waktunya.”
- Narasumber : ”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama. Sukses ya.”

Nama : Erna Mufida
 Instansi : Pengurus RT
 Lokasi : Jl. Klampis Ngasem II No. 1A, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 2 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat siang bu. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem.”

Narasumber : *“Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah ada surat penelitiannya?”*

Peneliti : “Sudah, ini bu permisi untuk suratnya.”

Narasumber : *“Oh iya mbak, silahkan bisa dimulai. Apa yang mau ditanyakan?”*

Peneliti : “Jadi begini bu, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jika bapak/ibu melihat respon masyarakat ketika mengetahui ada BLT yang disalurkan apakah mereka sangat antusias dan bergantung pada bantuan ini?”

Narasumber : *“Melihat antusias masyarakat kalau ada bantuan tunai seperti ini ya langsung pada senang dan semangat sekali ya. Bahkan setiap bulan mereka selalu menanyakan bantuan – bantuan seperti ini, jadi bisa dikatakan mereka bergantung pada bantuan langsung tunai ini.”*

Peneliti : “Bagaimana cara mensosialisasikan dan membangun pola pikir masyarakat jika ada yang protes mengenai BLT yang disalurkan?”

Narasumber : *“Kita hanya bisa mengusulkan. Jadi kalau ada warga yang protes kita berusaha menjelaskan apa yang kita tahu mengenai BLT ini hingga prosedurnya seperti apa.”*

Peneliti : “Apakah masyarakat lebih membutuhkan BLT atau program pemberdayaan yang lain seperti padat karya?”

Narasumber : *“Program pemberdayaan seperti padat karya sekarang sebenarnya sudah turun. Sudah ditawarkan untuk melatih keterampilan bahkan diuruskan NIB (Nomor Induk Berusaha) jadi enak sudah ada izin untuk usaha mereka.”*

Peneliti : “Apakah pihak Kelurahan Klampis Ngasem serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan BLT ini?”

- Narasumber : *"Pihak Kelurahan sudah melibatkan RT/RW dalam pelaksanaan penyaluran bantuan – bantuan seperti BLT. Kita dibantu sama kader – kader KSH itu, karena terkadang kita tidak bisa mengatasi tiba – tiba tim survey datang secara bersamaan di beberapa RT, dari kader – kader tersebut langsung dibagi dan disebar ke beberapa RT tersebut untuk mengantar dan mendampingi tim survey dari Dinas Sosial."*
- Peneliti : *"Apakah pemerintah dan masyarakat sudah saling bekerja dalam pelaksanaan BLT sama agar angka kemiskinan menurun?"*
- Narasumber : *"Ini yang sedikit susah ya, karena tidak semua dari mereka bisa diajak dan diarahkan ke kehidupan yang lebih makmur atau sejahtera. Masih sebagian saja, karena kalau dilihat tekad mereka untuk mandiri itu masih sangat minor."*
- Peneliti : *"Apakah pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat?"*
- Narasumber : *"Pelaksanaan BLT disini menurut saya sudah sesuai dengan kebijakan Pemkot maupun Pusat karena kita selalu mengikuti. Dari Kota atau Pusat ada program atau kegiatan apa kita akan terus membantu untuk menyelesaikan program – program tersebut, begitupun untuk BLT Pemerintah Kota ini."*
- Peneliti : *"Apakah sebelumnya sudah mengetahui dan tersosialisasikan mengenai BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota ini?"*
- Narasumber : *"Sebagai pengurus RT hanya sekilas mengetahui saja dan memang sudah ada wacana sebelumnya tentang BLT ini. Dari Kelurahan belum memberitahukan biasanya sebelum penyaluran nanti akan ada survey, ini belum ada pemberitahuan sama sekali."*
- Peneliti : *"Apakah penerima BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota?"*
- Narasumber : *"Sebagian besar penerima manfaat BLT sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tetapi terkadang Dinas Sosial itu turun langsung, jadi mereka hanya melihat casingnya tidak mengetahui keadaan sebenarnya bagaimana sehingga perlu didampingi."*
- Peneliti : *"Menurut bapak/ibu, apakah data penerima BLT yang dimiliki Dinas Sosial sudah sesuai sasaran?"*

- “Menurut saya dibidang tepat sasaran saya rasa masih kurang tepat ya, meskipun sudah sebagian masyarakat yang benar – benar membutuhkan dan berhak telah mendapatkannya. Namun, saya rasa data yang dimiliki Dinas Sosial harus terus diperbarui. Sayangnya kita memang kurang tahu kriterianya seperti apa, makanya kita hanya bisa mendampingi saja ketika Dinas Sosial melakukan survey.”*
- Peneliti : *”Oh jadi begitu ya bu, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih bu, mohon maaf mengganggu waktunya.”*
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama. Sukses ya.”*

Nama : Ainul Yaqin
 Instansi : Pengurus RT
 Lokasi : Jl. Klampis Ngasem No. 99, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 6 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat malam pak. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem.”

Narasumber : *“Iya mbak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah ada surat penelitiannya?”*

Peneliti : “Sudah, ini pak permisi untuk suratnya.”

Narasumber : *“Oh iya mbak, silahkan bisa dimulai. Apa yang mau ditanyakan?”*

Peneliti : “Jadi begini pak, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jika bapak/ibu melihat respon masyarakat ketika mengetahui ada BLT yang disalurkan apakah mereka sangat antusias dan bergantung pada bantuan ini?”

Narasumber : *”Jika dilihat dari antusias masyarakat mereka sangat antusias sekali, mereka juga memilih untuk bergantung pada BLT daripada mereka harus bekerja susah payah. Mereka memang sudah ketergantungan pada bantuan – bantuan yang diberikan oleh pemerintah.”*

Peneliti : “Bagaimana cara mensosialisasikan dan membangun pola pikir masyarakat jika ada yang protes mengenai BLT yang disalurkan?”

Narasumber : *”Karena seperti yang diketahui, pelaksanaan penyaluran BLT tidak langsung semua dapat begitu juga waktu pendataan oleh Dinas Sosial itu dipilah – pilah terlebih dahulu dengan melihat keadaan keluarga miskin yang benar – benar perlu didahulukan. Hal tersebut yang saya sampaikan jika ada yang protes. Sehingga sebagai RT hanya bisa mengusulkan dan keputusan akhir tetap ada di Dinas Sosial.”*

Peneliti : “Apakah masyarakat lebih membutuhkan BLT atau program pemberdayaan yang lain seperti padat karya?”

Narasumber : *”Kalau ditanya lebih membutuhkan BLT atau pelatihan ya menurut saya keduanya sama – sama dibutuhkan tergantung dari individunya masing – masing. Ada yang memang malas*

bekerja ya pasti mintanya langsung diberikan bantuan tunai. Begitu sebaliknya dengan mereka yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat pasti mereka memilih pelatihan agar mereka memiliki bekal untuk bekerja dan terjun ke dunia kerja yang mereka impikan nantinya.”

Peneliti : “Apakah pihak Kelurahan Klampis Ngasem serta pengurus RT/RW sudah dilibatkan dalam pelaksanaan BLT ini?”

Narasumber : *”Dalam pelaksanaan BLT pengurus RT/RW sudah dilibatkan. Biasanya dari Kelurahan menyampaikan undangan ke RT/RW untuk masyarakat mengambil BLT sesuai dengan waktu yang tertera dalam undangan tersebut.”*

Peneliti : *”Apakah pemerintah dan Masyarakat sudah saling bekerja dalam pelaksanaan BLT sama agar angka kemiskinan menurun?”*

Narasumber : *”Pemerintah terus berusaha mengajak masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut yaitu angka kemiskinan bisa menurun drastis, tetapi yang saya lihat di lapangan itu penghambatnya ya dari masyarakatnya sendiri. Mereka memang membutuhkan bantuan tersebut tapi hanya bisa mengandalkan bantuan saja tidak mau berusaha, jadi terkesan sangat manja dan tidak mau ribet.”*

Peneliti : *”Apakah pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat?”*

Narasumber : *”Pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sini menurut saya sudah cukup sesuai dengan Pemkot maupun Pusat meskipun terkadang masih ada yang tidak rata dan tidak tepat sasaran.”*

Peneliti : *”Apakah sebelumnya sudah mengetahui dan tersosialisasikan mengenai BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota ini?”*

Narasumber : *”Saya belum tahu kalau perihal BLT Pemerintah Kota yang ini, belum ada sosialisasi baik dari Kelurahan atau Dinas Sosial langsung.”*

Peneliti : *”Apakah penerima BLT di Kelurahan Klampis Ngasem sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota?”*

Narasumber : *”Saya rasa penerima manfaat BLT banyak yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, karena terkadang ya masih itu saja yang menerima. Dan sampai sekarang masih ada masyakat yang terlantar tidak mendapat bantuan sama sekali.”*

- Peneliti : “Menurut bapak/ibu, apakah data penerima BLT yang dimiliki Dinas Sosial sudah sesuai sasaran?”
- Narasumber : *“Data yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin mereka verifikasi ulang dan mereka survey, tetapi kita tidak mengetahui apa saja penilaiannya sehingga menurut kita sudah tepat dan layak menerima nyatanya tidak mendapatkan bantuan begitu sebaliknya. Pihak RT/RW tidak bisa memutuskan siapa saja penerima manfaat BLT ini dan mengikuti keputusan dari mereka. Jadi dibidang tepat juga belum ya.”*
- Peneliti : “Oh jadi begitu ya pak, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih pak, mohon maaf mengganggu waktunya.”
- Narasumber : *“Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama. Sukses ya.”*

Nama : Karniti
 Instansi : Penerima Manfaat
 Lokasi : Jl. Mleto I No. 12C, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 3 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi bu. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem. Apakah ibu berkenan jika saya sedikit tanya – tanya mengenai hal tersebut pada ibu?”

Narasumber : “*Oh iya mbak, silahkan. Apa yang mau ditanyakan?*”

Peneliti : “Jadi begini bu, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sebagai penerima manfaat, apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini?”

Narasumber : “*Saya kurang tahu mengenai BLT yang saya terima, pokoknya dikasih undangan ya saya ambil.*”

Peneliti : “Apakah bapak/ibu lebih membutuhkan BLT atau program Padat Karya?”

Narasumber : “*Kalau saya lebih memilih dapat bantuan seperti ini daripada pelatihan, lebih milih di rumah saja karena tidak sabar dan teliti kalau ikut pelatihan seperti itu, selain itu juga tidak ada pelatihan yang menarik minat saya.*”

Peneliti : “Apakah prosedur pengambilan BLT mudah dan petugas membantu bapak/ibu dalam penarikan dana bantuan?”

Narasumber : “*Menurut saya tidak rumit ya, saya datang ke Kelurahan tapi kadang juga di Kecamatan jadi tempatnya tidak menentu. Itu saya bawa undangan yang dikasih pak RT terus saya kasih ke petugas gitu aja karena saya tidak tahu pokoknya diarahkan dan petugasnya sangat membantu.*”

Peneliti : “Apakah BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Kota saat ini sudah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?”

Narasumber : “*Menurut saya sudah sesuai harapan, karena bantuan seperti ini yang ditunggu.*”

Peneliti : “Kebijakan BLT ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan, selain itu seperti yang kita ketahui pemerintah juga berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat. Apakah bapak/ibu akan memanfaatkan BLT untuk pemenuhan gizi

- keluarga sebagai support terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau ada kebutuhan lain yang lebih penting selain pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang?”
- Narasumber : *”Dengan dikasih BLT saya gunakan untuk belanja bahan pangan sehari – hari. Soal gizi memang penting tapi selain itu ya ada lagi kebutuhan yang lain seperti listrik, air, dan lain – lain.”*
- Peneliti : *”Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur penetapan anda sebagai penerima BLT?”*
- Narasumber : *”Saya tidak tahu. Pokoknya ada undangan diantar saja ke rumah dan disuruh ambil.”*
- Peneliti : *”Apa tanggapan bapak/ibu ketika mengetahui penerima BLT yang lain tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya?”*
- Narasumber : *”Sangat heran dan disayangkan, padahal niat pemerintah baik tapi malah bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan mungkin bisa saja disalahgunakan.”*
- Peneliti : *”Baik bu, mungkin cukup itu saja bu yang ingin saya tanyakan. Terimakasih ya bu, mohon maaf mengganggu waktunya.”*
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama.”*

Nama : Sukardi
 Instansi : Penerima Manfaat
 Lokasi : Jl. Klampis Ngasem V No. 5, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 4 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi pak. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem. Apakah bapak berkenan jika saya sedikit tanya – tanya mengenai hal tersebut pada bapak?”

Narasumber : “*Oh iya mbak, silahkan. Apa yang mau ditanyakan?*”

Peneliti : “Jadi begini pak, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sebagai penerima manfaat, apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini?”

Narasumber : “*Saya tidak tahu ini BLT apa pokoknya nominalnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saya dikasih undangan untuk mengambil.*”

Peneliti : “Apakah bapak/ibu lebih membutuhkan BLT atau program Padat Karya?”

Narasumber : “*Kalau disuruh memilih ya milih dikasih bantuan daripada pelatihan, karena saya sudah tua. Saya kesehariannya juga jadi tukang parkir.*”

Peneliti : “Apakah prosedur pengambilan BLT mudah dan petugas membantu bapak/ibu dalam penarikan dana bantuan?”

Narasumber : “*Menurut saya tidak dipersulit, tinggal datang ke tempat yang sudah ditentukan berdasarkan tanggal dan waktu saja. Petugas disana juga membantu saya, diarahkan sama mereka.*”

Peneliti : “Apakah BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Kota saat ini sudah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?”

Narasumber : “*Saya sangat setuju dan sesuai harapan karena sangat membantu perekonomian keluarga.*”

Peneliti : “Kebijakan BLT ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan, selain itu seperti yang kita ketahui pemerintah juga berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat. Apakah bapak/ibu akan memanfaatkan BLT untuk pemenuhan gizi keluarga sebagai support terhadap upaya yang dilakukan oleh

- pemerintah atau ada kebutuhan lain yang lebih penting selain pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang?”
- Narasumber : *”Pasti untuk pemenuhan gizi karena digunakan makan sehari – hari. Kalau kebutuhan lainnya masih banyak juga. Selain untuk makan, ya untuk bayar listrik, dan lain – lain.”*
- Peneliti : *”Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur penetapan anda sebagai penerima BLT?”*
- Narasumber : *”Saya kurang tahu pasti tiba – tiba dikasih undangan pengambilan BLT. Sepertinya diusulkan oleh RT.”*
- Peneliti : *”Apa tanggapan bapak/ibu ketika mengetahui penerima BLT yang lain tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya?”*
- Narasumber : *”Sebenarnya tujuan pemerintah memberi bantuan ini sangat benar agar kemiskinan menurun, tetapi sangat disayangkan juga jika ada yang tidak tepat seperti itu.”*
- Peneliti : *”Baik pak, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih ya pak, mohon maaf mengganggu waktunya.”*
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama.”*

Nama : Tina
 Instansi : Penerima Manfaat
 Lokasi : Jl. Klampis Ngasem V No.1, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 5 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi bu. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem. Apakah ibu berkenan jika saya sedikit tanya – tanya mengenai hal tersebut pada ibu?”

Narasumber : “*Oh iya mbak, silahkan. Apa yang mau ditanyakan?*”

Peneliti : “Jadi begini bu, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sebagai penerima manfaat, apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini?”

Narasumber : “*Mengenai BLT ini saya belum tahu dan tidak ada sosialisasi apapun dari RT/RW, Kelurahan, maupun Dinas Sosial. Saya tahunya hanya dikasih surat undangan saja untuk mengambil uang bantuannya.*”

Peneliti : “Apakah bapak/ibu lebih membutuhkan BLT atau program Padat Karya?”

Narasumber : “*Menurut saya dua – duanya penting dan dibutuhkan, dengan pelatihan dapat menambah keterampilan dan bisa mengisi waktu luang juga. Tetapi saya takut dan masih ragu buat ikut karena pekerjaan rumah juga banyak, belum lagi ngurus cucu juga.*”

Peneliti : “Apakah prosedur pengambilan BLT mudah dan petugas membantu bapak/ibu dalam penarikan dana bantuan?”

Narasumber : “*Menurut saya prosedurnya tidak sulit ya, tinggal datang saja tetapi antrinya lumayan lama dan panjang meskipun setiap petugas yang ada disana memiliki tugas masing – masing. Mereka sangat membantu dan mengarahkan masyarakat yang mengambil BLT.*”

Peneliti : “Apakah BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Kota saat ini sudah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?”

Narasumber : “*Sesuai karena cukup membantu saya mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari.*”

- Peneliti : ”Kebijakan BLT ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan, selain itu seperti yang kita ketahui pemerintah juga berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat. Apakah bapak/ibu akan memanfaatkan BLT untuk pemenuhan gizi keluarga sebagai support terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau ada kebutuhan lain yang lebih penting selain pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang?”
- Narasumber : *”Pemenuhan gizi pasti ya karena memang BLT uangnya untuk sehari – hari. Kalau kebutuhan yang lain pasti ada juga.”*
- Peneliti : ”Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur penetapan anda sebagai penerima BLT?”
- Narasumber : *”Saya kurang tahu ya, tapi saya pernah bilang ke RT kalau belum pernah mendapat bantuan. Mungkin diajukan.”*
- Peneliti : ”Apa tanggapan bapak/ibu ketika mengetahui penerima BLT yang lain tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya?”
- Narasumber : *”Saya terkadang ya heran penilaiannya dari segi apa sampai warga yang terbilang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari justru itu yang mendapatkan bantuan. Harapannya pemerintah lebih selektif lagi.”*
- Peneliti : ”Baik bu, mungkin cukup itu saja bu yang ingin saya tanyakan. Terimakasih ya bu, mohon maaf mengganggu waktunya.”
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama.”*

Nama : Jupri
 Instansi : Penerima Manfaat
 Lokasi : Jl. Mleto No. 42, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya
 Waktu : 4 April 2024

Peneliti : “Permisi, selamat pagi pak. Saya Emmy, mahasiswa UNTAG Surabaya. Disini saya izin melakukan penelitian mengenai BLT Pemerintah Kota yang telah disalurkan di Klampis Ngasem. Apakah bapak berkenan jika saya sedikit tanya – tanya mengenai hal tersebut pada bapak?”

Narasumber : “*Oh iya mbak, silahkan. Apa yang mau ditanyakan?*”

Peneliti : “Jadi begini pak, BLT Pemerintah Kota Surabaya setelah saya cari tahu sudah disalurkan hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sebagai penerima manfaat, apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini?”

Narasumber : “*Saya tidak tahu mengenai BLT ini, dari RT hanya memberi undangan pengambilan BLT saja.*”

Peneliti : “Apakah bapak/ibu lebih membutuhkan BLT atau program Padat Karya?”

Narasumber : “*Menurut saya pribadi lebih membutuhkan bantuan tunai daripada pelatihan, karena saya sudah tidak dapat bekerja dengan kondisi yang sudah lanjut usia dan kurang sehat..*”

Peneliti : “Apakah prosedur pengambilan BLT mudah dan petugas membantu bapak/ibu dalam penarikan dana bantuan?”

Narasumber : “*Menurut saya prosedur pengambilannya mudah. Ketika sampai di tempat pengambilan BLT langsung antri, waktu mengambil juga diarahkan oleh petugasnya di bagiannya masing – masing. Mereka sepertinya sudah paham dan sangat membantu.*”

Peneliti : “Apakah BLT yang disalurkan oleh Pemerintah Kota saat ini sudah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?”

Narasumber : “*Sesuai dengan harapan karena di masa tua seperti ini tidak ada dana pensiun karena saya bukan pegawai negeri dulunya, sehingga terbantu.*”

Peneliti : “Kebijakan BLT ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan, selain itu seperti yang kita ketahui pemerintah juga berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat. Apakah

- bapak/ibu akan memanfaatkan BLT untuk pemenuhan gizi keluarga sebagai support terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau ada kebutuhan lain yang lebih penting selain pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang?”
- Narasumber : *”Pemenuhan gizi iya, kebutuhan lainnya juga iya. Memang kebutuhan kita kan banyak tidak hanya kebutuhan sehari – hari saja.”*
- Peneliti : *”Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur penetapan anda sebagai penerima BLT?”*
- Narasumber : *”Saya tidak tahu mengenai penunjukan penerima BLT, saya hanya tahu diberi undangan ya berarti saya dapat bantuan gitu saja.”*
- Peneliti : *”Apa tanggapan bapak/ibu ketika mengetahui penerima BLT yang lain tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya?”*
- Narasumber : *”Saya juga tidak tahu, tidak berani banyak berkomentar kalau ada yang tidak tepat sasaran seperti itu.”*
- Peneliti : *”Baik pak, mungkin cukup itu saja pak yang ingin saya tanyakan. Terimakasih ya pak, mohon maaf mengganggu waktunya.”*
- Narasumber : *”Iya mbak tidak apa – apa, sama – sama.”*

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Anisya Sofiantin selaku Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya



2. Wawancara dengan Bapak Moch. Fajar Fanani selaku Lurah Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya



3. Wawancara dengan Bapak Sriyanto selaku Pengurus RW



4. Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku Pengurus RW



5. Wawancara dengan Ibu Erna Mufida selaku Pengurus RT



6. Wawancara dengan Bapak Ainul Yaqin selaku Pengurus RT



7. Wawancara dengan Ibu Karniti selaku penerima manfaat BLT



8. Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku penerima manfaat BLT



9. Wawancara dengan Ibu Tina selaku penerima manfaat BLT



10. Wawancara dengan Bapak Jupri selaku penerima manfaat BLT



LAMPIRAN 4

IJIN PENELITIAN



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 18 Maret 2024

Nomor : 0901/K/FISIP/III/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Tunjungan No. 1 - 3, Genteng, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Emmy Dyah Rahmawati (1112000088)	Jl. Klampis Ngasem II No. 22B, Sukolilo, Kota Surabaya	081259969618

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Sosial Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"ANALISIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI MENGGUNAKAN NARRATIVE POLICY FRAMEWORK DI KELURAHAN KLAMPIS NGASEM SURABAYA"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


 Dekan
 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
 NPP 20120.87.0103



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Maret 2024

Nomor : 0911/K/FISIP/III/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kelurahan Klampis Ngasem
 Jl. Arief Rahman Hakim No. 103C, Sukolilo, Kota Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

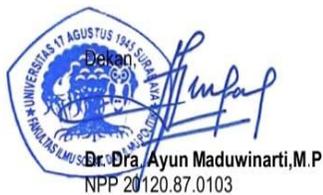
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Emmy Dyah Rahmawati (1112000088)	Jl. Klampis Ngasem II No. 22B, Sukolilo, Kota Surabaya	081259969618

Guna melakukan pengambilan data di:

"Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya serta RT/RW Setempat"

Dengan Judul Skripsi: **"ANALISIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI MENGGUNAKAN NARRATIVE POLICY FRAMEWORK DI KELURAHAN KLAMPIS NGASEM SURABAYA"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


 Dekan
Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
 NPP 20120.87.0103

LAMPIRAN 5

KARTU BIMBINGAN



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F.101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Emmy Dyah Rahmawati
 NBI : 1112000088
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., MAP
 Dosen Pembimbing II : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Narrative Policy Framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	26/2 24	Perbaiki judul & BAB I	<i>[Signature]</i>	
2	6/3 2024	• tolong perbaiki + • siapka prognosis BAB. IV		<i>[Signature]</i>
3	6/3 24	Perbaiki Bab I-III, susun pedoman wawancara	<i>[Signature]</i>	
4	14/3 24	ACC turun lapangan	<i>[Signature]</i>	
5	15/3 24	ACC pedoman wawancara dan siapka teknisnya		<i>[Signature]</i>
6	20/4 24	Perbaiki bab IV	<i>[Signature]</i>	
7		1. Setup tabel (judul dan sumber) 2. Cepat ke pembahasan.		<i>[Signature]</i>
8	27/5 24	Perbaiki Bab 4.2 ✓ Perbaiki Bab 5 ✓	<i>[Signature]</i>	
9	29/5 24	Saran: <i>[Handwritten note]</i>		<i>[Signature]</i>
10	3/6 2024	Perbaiki bab 5 & lengkapi ringkasan - lampiran	<i>[Signature]</i>	

LAMPIRAN 6

HASIL UJI PLAGIASI



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor:415/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Emmy Dyah Rahmawati

NBI : 1112000088

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juni 2024

Mengetahui
Kepala Lab. Otonomi

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

LAMPIRAN 7

BUKTI PUBLIKASI JURNAL



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA YAPPI MAKASSAR

Status Terakreditasi B: Keputusan BAN-PT. Nomor : 3842/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Sekretariat : Jl. Sumba No. 46 / Jl. Abd. Kadir No. 29
Telp. (0411) 3616142 No. Fax. (0411) 3623310 Makassar 90174
Website/Email : www.stiyappimakassar.ac.id / stiyappimks@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER

No. 1261 / EKSEKUSI/STIAYAPPI/F/2024

Kepada Yth,
Bapak / Ibu / Saudara / i : **Emmy Dyah Rahmawati, Anggraeny Puspaningtyas, Adi Soesiantoro**

di -
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan hormat,
Kami dari Redaksi **Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara; dengan e-ISSN : 2987-7113, p-ISSN : 2987-9124**, adalah jurnal yang menerbitkan artikel-artikel penelitian sebagai hasil Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:

"Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Narrative Policy Framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya"

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di **Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2024**.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Makassar, 10 Juni 2024
Editor Chief Journal :

Dr. Nurasia Natsir, S.Hum., M.Hum

LAMPIRAN 8

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Emmy Dyah Rahmawati

NIM : 1112000088

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

Catatan Perbaikan:

- ① Masih ada ukuran huruf TNR 12, sesuaikan dengan TNR 11
- ② Artikel jurnal mohon dilampirkan
- ③ Interview guide apakah hanya 1 pertanyaan dalam 1 indikator?

Surabaya, 8 juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Anggraeny Puspaningdyar, M.AP


Anggraeny Puspaningdyar, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Emmy Dyah Rahmawati

NIM : 1112000088

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

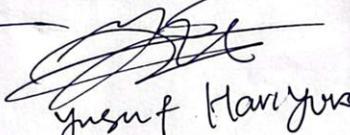
Catatan Perbaikan:

dalam dokumen Catatanmu, bahwa
dokumen revisinya

Surabaya, 3-7-24
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Yusuf Hariyanto


Yusuf Hariyanto

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Emmy Dyah Rahmawati

NIM : 1112000088

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 1 Juli 2024

Judul Skripsi : Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

Catatan Perbaikan:

- Lihat & skripsi
- Waktu konsultasi revisi wajib membawa skripsi sebelum & sesudah & revisi

Surabaya, 8 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Rahmatan

Revisi dari Dosen Penguji,


Rahmatan

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.



Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

Emmy Dyah Rahmawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: emmydyahrahmawati@gmail.com

Abstract. *The Government of Surabaya has empowered by providing Direct Cash Assistance (BLT) in accordance with the Regulations of the Mayor of Surabaya No. 130 Year 2023 on the Implementation of Direct Cash Aid to the Poor Families in the City of Surabaya through Jatim Bank and has been implemented in Klampis Ngasem Village of Surabaya, but many still do not know about the BLT of the Government of this city. As a result, the implementation of the BLT is still unclear. The research uses the Shanahan Narrative Policy Framework (NPF) Theory and descriptive qualitative methods with an approach through observations, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the BLT in Klampis Ngasem Village Surabaya has been well carried out and was welcomed by the very high enthusiasm of the community. However, in Klampis Ngasem Village there is still a lack of knowledge about the BLT and the Solid Work Program because there is no socialization about it. At the micro level, societies are used to relying on help so there is no desire to be independent and difficult to move towards prosperity. At the meso level, there is still a lack of communication about the BLT of the City Government between the institutions and the related apparatus that affects public understanding. At the macro level, the lack of transparency of the data and the criteria of the recipient by the agency on the relevant apparatus. The City Government also created a culture of dependence on aid in Klampis Ngasem Village Surabaya.*

Keywords: *Analysis, BLT, NPF*

Abstrak. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya melalui Bank Jatim dan sudah terlaksana di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya, namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini. Akibatnya pelaksanaan BLT masih belum jelas. Penelitian ini menggunakan Teori *Narrative Policy Framework* (NPF) menurut Shanahan dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan disambut antusias yang sangat tinggi dari masyarakat. Program Padat Karya juga ditawarkan sebagai penyeimbangannya. Namun, di Kelurahan Klampis Ngasem masih kurang pengetahuan mengenai BLT dan Program Padat Karya karena tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut. Pada level mikro masyarakat sudah terbiasa bergantung pada bantuan sehingga tidak ada keinginan untuk mandiri dan sulit digerakkan menuju kemakmuran. Pada level meso masih terjadi kurangnya komunikasi mengenai BLT Pemerintah Kota antara lembaga dan aparatur terkait yang berdampak pada pemahaman masyarakat. Pada level makro terjadi kurangnya transparansi data dan kriteria penerima oleh lembaga pada aparatur terkait. BLT Pemerintah Kota juga menciptakan budaya ketergantungan pada bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

Kata kunci: *Analisis, BLT, NPF*

LATAR BELAKANG

Pemasalahan publik di Indonesia saat ini sangat beragam dari berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah masyarakat yang sering kali menjadi sorotan adalah PMKS, sebuah isu yang terus menerus muncul di Indonesia. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah sekelompok individu yang mengalami rintangan, kesukaran, atau gangguan yang mencegah mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam fungsi-fungsi sosialnya, menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Kendala-kendala ini meliputi kemiskinan, pengabaian, cacat, kerugian sosial, keterbelakangan, isolasi, dan dampak negatif perubahan lingkungan, seperti bencana alam. Pemerintah terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut secara tuntas. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan mendistribusikan bantuan sosial. Bantuan Sosial (bansos) pemerintah kembali diberikan kepada masyarakat. Penerima bantuan sosial menerima dukungan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka (Melati Putri Arsika, 2024). Ada banyak jenis bantuan sosial yang diberikan, seperti PKH, BLT El Nino, Beras, BPNT, dan PIP.

Kota Surabaya merupakan contoh kemajuan di Provinsi Jawa Timur yang sering menjadi inspirasi untuk kemajuan di wilayah lain. Kota Surabaya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, menarik penduduk dari seluruh dunia untuk tinggal. Kota Surabaya memberikan kontribusi terbesar terhadap kepadatan penduduk Jawa Timur, provinsi terpadat kedua di Indonesia (Salim, 2023). Oleh karena itu, arus urbanisasi yang berlebihan terjadi di kota besar seperti Surabaya dan dapat menyebabkan masalah yang serius seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Kota Surabaya dianggap sebagai salah satu yang paling serius menangani masalah kesejahteraan sosial PMKS utama ini, khususnya pada kategori Keluarga Miskin yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga, Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan PMKS khususnya Keluarga Miskin juga dilakukan dengan memberikan bantuan sosial salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai juga dikenal dengan sebutan BLT adalah bantuan sosial dengan memberikan uang kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya. Bantuan Langsung Tunai ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota diberikan sebesar Rp200.000 setiap bulan. Faktanya, sejak awal tahun 2024 bantuan langsung tunai ini diberikan kepada keluarga miskin di Kota Surabaya yang belum pernah menerima bantuan sosial. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat dapat berkembang dan sejahtera. Daftar penerima BLT merupakan warga yang masuk ke dalam data keluarga miskin Pemerintah Kota Surabaya. Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, penerima BLT ini tidak dapat menerima bantuan sosial ganda. Distribusi Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bank Jatim dan menerbitkan *Virtual Account* kepada penerima bantuan. Dinas Sosial Kota Surabaya memastikan Bantuan Langsung Tunai ini telah disalurkan ke 31 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

Diantara 31 kecamatan di Kota Surabaya yang menjadi titik penyebaran Bantuan Langsung Tunai ini adalah Kecamatan Sukolilo. Kecamatan ini membawahi beberapa kelurahan yang menjadi bagian administratifnya yaitu antara lain Kelurahan Semolowaru, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Menur Pumpungan, Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Medokan Semampir, dan Kelurahan Keputih. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu di Kelurahan Klampis Ngasem.

Tabel 1. Data Penerima BLT Pemerintah Kota Kelurahan Klampis Ngasem

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	67
2	Februari	28
3	Maret	19
4	April	19

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024

Peneliti menemukan masih banyak orang di Kelurahan Klampis Ngasem belum mengetahui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota yang berlaku mulai awal tahun 2024. Akibatnya pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai di Kelurahan Klampis Ngasem masih belum jelas. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bantuan langsung tunai menggunakan narrative policy framewok di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Menurut ahli, istilah "kebijakan publik" dan "kebijakan" memiliki banyak arti. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 04 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah menetapkan istilah-istilah

untuk kebijakan publik. Kebijakan publik ialah suatu keputusan yang dibuat oleh negara, terutama pemerintahan, sebagai cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Ini adalah proses atau metode yang bermanfaat untuk membawa warga negara di awal, memasuki masa transisi, dan menuju masyarakat yang diimpikan. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah aktivitas yang unik, memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kebijakan lain (Haudi, 2021). Kebijakan publik biasanya dipikirkan, dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas di sistem politik, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, hakim, dan administratif.

Narrative Policy Framework

Narrative Policy Framework adalah pendekatan atau rangka kerja penelitian tentang proses kebijakan publik, Shanahan dalam (Salahudin, 2019). NPF menekankan bahwa sebelum menggunakan NPF sebagai rangka kerja penelitian, peneliti harus mempertimbangkan lima core asumsi NPF berikut : 1) Konstruksi sosial, merupakan bagian yang paling penting dari realitas kebijakan publik yakni realitas sosial yang dikonstruksikan, 2) Relatifitas yang terikat. Kebijakan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang menciptakan realitas kebijakan yang berbeda, variasi ini merupakan terikat dan terintegrasi dalam sebuah kebijakan (seperti sistem politik, dan ideologi), 3) Elemen-elemen struktur yang bersifat umum dirumuskan secara spesifik dan dapat diidentifikasi, 4) Terdapat tiga level analisis: mikro (individual), meso (group), dan makro (budaya dan institusi), 5) Narrative dipahami untuk memposisikan peran pengetahuan manusia, komunikasi. Penelitian berfokus pada bagaimana orang membuat narasi dan dibentuk oleh narasi pada tingkat mikro.

Pengertian Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan bantuan sosial sebagai "bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial". Seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah penerima bantuan sosial. Bantuan sosial dibagi menjadi dua kategori, sementara dan berkelanjutan. Bansos untuk bencana alam dapat diberikan melalui kementerian atau lembaga "dengan syarat" atau "tanpa syarat".

Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan pemerintah yang dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Program ini adalah bukti tindakan pemerintah yang menganut nilai tertentu, yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia, khususnya masalah kemiskinan (Pramanik, 2020). Tujuan dari Bantuan Langsung Tunai adalah untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan untuk mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan mereka sebagai akibat dari kesulitan ekonomi dan tingkat tanggung jawab sosial bersama. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya. Peraturan tersebut menetapkan sasaran program dari Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota.

METODE PENELITIAN

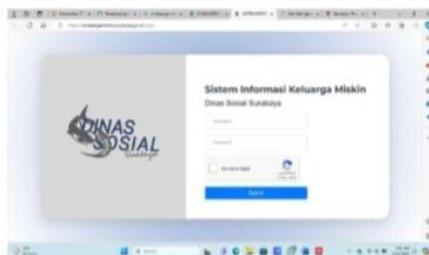
Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif, dengan memfokuskan pada Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan *Narrative Policy Framework* di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dengan melihat 5 (lima) core asumsi *Narrative Policy Framework* (NPF) yaitu Kontruksi Sosial, Relatifitas yang Terikat, Elemen – Elemen yang Terstruktur, Level Analisis, dan *Narrative*. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung tentang bantuan langsung tunai, dan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen seperti LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), buku, e - Jurnal, website yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yang pertama pengumpulan data, kedua penyajian data dan ketiga kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan program bantuan langsung tunai diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya yang menjadi dasar dan acuan dalam penyaluran bantuan langsung tunai agar tertib, adil dan tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimaksud dalam Peraturan Walikota tersebut merupakan bantuan yang berasal dan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan dan dikhususkan bagi keluarga miskin yang belum sama sekali menerima bantuan baik dari pusat maupun kota. Pelaksanaan penyaluran BLT di Kota Surabaya termasuk di Kelurahan Klampis Ngasem dilaksanakan setiap bulan sejak awal Januari 2024 dengan diberikannya undangan dari Dinas Sosial kepada masyarakat yang menerima dan telah terdaftar di data keluarga miskin. Data keluarga miskin tersebut sudah ada di dalam aplikasi Si Keluarga Miskin. Aplikasi Si Keluarga Miskin adalah aplikasi milik Pemerintah Kota Surabaya yang

membantu penyinkronan data keluarga miskin mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan mendata keluarga miskin agar bantuan pemerintah dapat diberikan dengan tepat, efektif, dan efisien.

Gambar 1. Halaman Beranda Aplikasi Si Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Surabaya



Sumber : Google, 2024

Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program bantuan yang telah dilaksanakan. Penting untuk dijaga kerahasiaan data yang dimasukkan dalam aplikasi ini, sehingga data yang terus diperbarui akan terjamin dan tidak disalahgunakan. Menurut keterangan dari pihak Dinas Sosial, aplikasi Si Keluarga Miskin ini hanya bisa diakses oleh UPT (Dinas Sosial Kota Surabaya). Dalam pelaksanaan pemberian BLT, data nama – nama usulan dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan oleh pihak Dinas Sosial dimasukkan ke dalam aplikasi Si Keluarga Miskin dan diverifikasi dengan melakukan survey lapangan. Hasil survey tersebut diolah datanya dengan rumus PMT (*Proxy Means Test*) yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, sehingga penetapan penerima BLT dilakukan secara *by system*. Kepala Dinas akan memvalidasi penerima BLT dan pihak Dinas Sosial akan memberikan undangan kepada masyarakat yang menerima untuk pengambilan BLT. Undangan tersebut disalurkan melalui Kelurahan untuk disampaikan kepada RT/RW setempat kemudian diberikan ke warga penerima manfaat. Warga akan datang ke tempat pengambilan BLT sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Bank Jatim dalam penyaluran. Dinas Sosial akan memberikan dana yang akan diberikan sesuai jumlah penerima yang ada di data penerima BLT tersebut. Data penerima dari Dinas Sosial juga diberikan kepada Bank Jatim untuk dikeluarkan kode *Virtual Account* tiap penerima. Ketika pengambilan, penerima manfaat memberikan undangan yang telah diterima ke petugas Bank Jatim yang kemudian akan di cek kembali dengan data dari Dinas Sosial. Jika sudah sesuai, petugas akan memproses penarikan dana bantuan tersebut, tanda tangan dan foto sebagai bukti bahwa warga tersebut telah menerima bantuan.

Gambar 2. Penyaluran BLT oleh Petugas Bank Jatim



Sumber: Pemerintah Kota Surabaya, Google, 2024

1. Konstruksi Sosial

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), konstruksi sosial merupakan bagian yang paling penting. Karena konstruksi sosial ini dilakukan dengan membangun interaksi dan komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan. Tujuannya agar informasi mengenai kebijakan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi sosial pada pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem belum dilaksanakan. Pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dapat ditemukan bahwa tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait BLT Pemerintah Kota yang sedang disalurkan saat ini. Sehingga pemahaman informasi mengenai BLT ini oleh masyarakat masih sangat minim. Masyarakat hanya mengetahui ketika diberi undangan pengambilan BLT, mereka menjadi salah satu penerima manfaat yang terpilih. Lain hal mengenai BLT ini mereka tidak mengetahuinya. Meskipun minim informasi mengenai BLT yang diberikan, masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem sangat bergantung pada bantuan ini. Ketergantungan masyarakat ini mengakibatkan terjadinya aksi protes jika bantuan tidak mereka terima. Pihak RT/RW memberi penjelasan bahwa BLT diberikan secara bertahap dan jika ada warga yang layak menerima tetapi belum menerima akan diusulkan kembali. Namun keputusan akhir penerima ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Dinas Sosial) Kota Surabaya.

2. Relatifitas yang Terikat

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), relatifitas yang terikat merupakan bagian dari konstruksi sosial yang direalitaskan. Relatifitas yang terikat digunakan untuk melihat realitas tentang adanya kebijakan yang sedang diterapkan. Realitas tersebut ada hubungan antara tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, realitas yang ada

dapat dilihat dari tujuan pemerintah dengan memberikan BLT akan menurunkan tingkat kemiskinan dan akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sebagai pendampingnya pemerintah juga menawarkan Program Padat Karya untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Namun, program pelatihan ini ditolak oleh banyak masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem yang pengangguran dan masuk ke dalam keluarga miskin. Mereka menolak karena berbagai alasan dan takut sebelum memulai. Mereka hanya memilih untuk bergantung pada bantuan pemerintah termasuk BLT ini. Masyarakat memprotes jika tidak menerima bantuan tanpa mengetahui bahwa data penerima yang ada di Kelurahan dan RT/RW berasal dari Dinas Sosial. Terkait data penerima, realitas yang terjadi terdapat ketidaksinkronan data antara data dari Kelurahan Klampis Ngasem dan data dari Dinas Sosial yang memungkinkan data tersebut bukan data penerima BLT Pemerintah Kota namun jenis BLT yang lain.

3. Elemen – elemen yang Terstruktur

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), elemen – elemen terstruktur yang bersifat umum dirumuskan secara spesifik dan dapat diidentifikasi. Elemen – elemen yang terstruktur merupakan bagian dari pelaksana kebijakan. Elemen – elemen yang terstruktur mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Mulai dari tingkat yang paling atas hingga bawah. Pada pelaksanaan BLT Pemerintah Kota, Pemerintah Kota Surabaya dengan bantuan berbagai pihak terkait seperti Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, KSH (Kader Surabaya Hebat), serta Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran BLT. Di Kelurahan Klampis Ngasem, pihak Kelurahan dan RT/RW telah dilibatkan dengan dibantu oleh Kader KSH yang turun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui keadaan masyarakat secara nyata. Kader – kader ini yang membantu untuk mendampingi jika tim survei dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain KSH, ada petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi yang jelas dan layanan mereka tidak rumit. Proses pengambilan juga cukup mudah.

4. Level Analisis

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019) analisis dalam *Narrative Policy Framework* (NPF) terdapat 3 (tiga) level, yaitu mikro (individu), meso (group), dan makro (budaya dan institusi).

4.1 Level Mikro

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level mikro fokus penelitian

pada pertanyaan bagaimana individu membuat narasi dan dibentuk oleh narasi. Artinya, fokus utama dalam penelitian tingkat ini yaitu adanya narasi yang diciptakan dan dampak yang ditimbulkan dalam memengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Narasi dalam hal ini adalah deskripsi atau penjelasan mengenai suatu kebijakan. Kebijakan dalam penelitian ini yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian karena memang tidak ada sosialisasi mengenai BLT Pemerintah Kota Surabaya dan pengetahuan mendalam mengenai Program Padat Karya yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, orang-orang yang menerima BLT dan bantuan lain di Kelurahan Klampis Ngasem sebagian besar tidak dapat diajak untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Karena telah ketergantungan mereka pada BLT, Program Padat Karya yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota ditolak, mereka bergantung pada bantuan saja dan tidak mau berusaha. Akibatnya, tidak ada keinginan untuk lepas dari bantuan atau mandiri. Pemerintah selalu berusaha mendorong, menggerakkan dan membantu mereka keluar dari taraf hidup yang tidak layak. Namun, hanya sebagian masyarakat yang dapat diajak dan digerakkan menuju kemakmuran. Meskipun di sisi lain mereka setuju dengan tujuan pemerintah dan BLT yang diberikan sesuai dengan harapan.

4.2 Level Meso

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level meso penelitian fokus pada bagaimana aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narrative kepada proses kebijakan yang berpengaruh. Artinya, penelitian dalam tingkat ini berfokus pada bagaimana aktor – aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narasi (penjelasan) yang bertujuan untuk memengaruhi proses kebijakan yang sedang berlangsung. Level meso dalam penelitian ini berkaitan dengan *interest group* atau orang – orang yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. *Group* atau orang – orang yang dimaksud tersebut dalam penelitian ini adalah Pengurus Kelurahan, RW, RT, Kader KSH, dan Petugas Bank Jatim yang membantu dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mereka bekerja sama untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial, Kelurahan, dan Pengurus RT/RW. Pengurus RT/RW mengakui bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh Kelurahan tentang BLT Pemerintah Kota ini. Pihak Kelurahan Klampis Ngasem juga kurang mengetahuinya. Namun pihak Dinas Sosial mengatakan mengatakan bahwa camat dan lurah telah diberitahu tentang

BLT ini sehingga mereka dapat memberi tahu pengurus RT/RW dan masyarakatnya. Ini juga berdampak pada bagaimana warga memahami BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

4.3 Level Makro

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level makro penelitian mengolaborasi pertanyaan riset bagaimana perubahan atau stabilitas kebijakan dalam konteks budaya dan institusi politik. Artinya, penelitian ini berfokus pada pemahaman bagaimana suatu kebijakan dapat berubah atau tetap stabil dengan mempertimbangkan budaya dan institusi yang ada. Level makro pada penelitian ini berkaitan dengan lembaga atau institusi yang mengeluarkan dan menerapkan kebijakan, serta budaya yang diciptakan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, lembaga atau institusi yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan dan melaksanakan pemberian BLT serta budaya yang tercipta akibat adanya BLT ini dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Surabaya masih kurang koordinasi serta transparansi mengenai data dan kriteria penerima BLT. Karena pada kenyataannya masih ada yang menerima bantuan ganda dan tidak tepat sasaran ketika undangan pengambilan BLT dibagikan. Pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam data penerima bantuan. Mereka juga tidak mengetahui kriteria yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya ketergantungan bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem telah mereajalela. Masyarakat tidak akan berhenti bergantung. Sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika bantuan ini diberikan secara konsisten, agar masyarakat juga terdorong untuk mandiri, kreatif dan inovatif.

5. Narrative

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), narrative dipahami untuk memposisikan peran pengetahuan manusia, komunikasi. Narrative dalam *Narrative Policy Framework* (NPF) ini merupakan bagian dari pendeskripsian temuan – temuan mengenai suatu kebijakan menjadi sebuah cerita. Bagian narrative dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menceritakan beberapa temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan beberapa fakta yang ada di lapangan. **Pertama**, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Kota telah tersalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dan mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat Klampis Ngasem. Antusias yang berlebih membuat mereka juga merasa bergantung pada BLT yang diberikan. Masyarakat mengharapkan bantuan tunai seperti ini akan diberikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka yang panjang oleh pemerintah di setiap bulannya. Karena dengan bantuan ini mereka juga akan mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan misi dan tujuannya dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam mengimbangi adanya BLT, pemerintah juga menawarkan Program Padat Karya. Karena untuk mewujudkan misi pemerintah untuk manguangi kemiskinan maka pengangguran juga harus dihapuskan. Di Kelurahan Klampis Ngasem Program Padat Karya telah ditawarkan kepada masyarakat tetapi banyak yang menolak dan tidak tertarik dengan program pelatihan ini karena berbagai alasan. Dibandingkan harus mengikuti program pelatihan, masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan bantuan saja. Mereka tetap memilih menunggu mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membantu perekonomian mereka. Sehingga melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang masuk kategori keluarga miskin terlebih lagi mendapatkan bantuan tunai belum bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Surabaya yang sejahtera tanpa adanya kemiskinan yang berkepanjangan. Masih sebagian saja masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang bisa diajak dan digerakkan menuju kehidupan yang makmur. Hal itu dikarenakan mereka telah ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, akibatnya tidak mempunyai keinginan untuk mandiri. Budaya ketergantungan bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem telah merajalela. **Kedua**, masyarakat Klampis Ngasem tidak mengetahui hakekat dari BLT yang diberikan. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup tentang BLT dan hanya mengetahui bahwa mereka merupakan bagian dari penerima BLT. Menurut fakta di lapangan ini disebabkan karena bahwa tidak ada sosialisasi tentang BLT Pemerintah Kota yang diberikan di Kelurahan Klampis Ngasem. Saat tidak ada sosialisasi seperti ini, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dan merasa bahwa mereka seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah melakukan protes. Walaupun mereka melakukan aksi protes, pengurus RT/RW juga tidak mengetahui tentang data penerima BLT. Namun setelah melakukan penelitian, ternyata aparaturnya sendiri termasuk pengurus RT, RW, dan Lurah, tidak mengetahui banyak tentang BLT ini. Sebaliknya, Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa BLT Pemerintah Kota yang sedang diberikan telah diberitahukan

kepada Lurah atau Camat untuk disampaikan kepada pengurus RT/RW danarganya. Sehingga dengan demikian peneliti menemukan adanya komunikasi yang kurang antara Dinas Sosial, Kelurahan dan pengurus RT/RW. Hal ini juga berdampak pada bagaimana masyarakat memahami bantuan yakni BLT yang diberikan oleh pemerintah. **Ketiga**, Pengurus RT/RW dan Kelurahan tidak hanya kurang mengetahui BLT Pemerintah Kota, tetapi mereka juga tidak mengetahui data penerima BLT yang diberikan. Karena Dinas Sosial Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) yang menetapkan keluarga miskin yang menerima. Penerima BLT dari Pemerintah Kota Surabaya adalah keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan apapun sebelumnya dan telah terdaftar di aplikasi Si Keluarga Miskin milik Pemerintah Kota Surabaya. Sehubungan dengan data keluarga miskin yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, hanya unit pelaksana teknis Dinas Sosial Kota Surabaya yang dapat mengakses aplikasi tersebut. Pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan hanya dapat membantu warga dalam pendaftaran SKKM (Surat Keterangan Keluarga Miskin). Jika data dari Dinas Sosial sudah ada, seharusnya sudah valid. Namun, ada beberapa data tidak tepat sasaran dan mendapatkan bantuan ganda. sehingga perlu pendataan ulang. Ketika hal tersebut terjadi, pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui kriteria penilaian yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan penerima bantuan. Ketika peneliti meminta data penerima BLT kepada pihak Kelurahan Klampis Ngasem, ternyata data yang diterima peneliti dari Kelurahan tidak sinkron dengan data yang diterima dari Dinas Sosial. Hal ini terjadi karena data dari Dinas Sosial tidak transparan kepada aparat yang membantu, seperti Kelurahan dan pengurus RT/RW. Untuk memastikan data penerima BLT sesuai dengan kriteria, koordinasi data antara Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW seharusnya sangat diperlukan. **Keempat**, selain bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota Surabaya juga didukung oleh beberapa pihak lain termasuk KSH dan Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran dana bantuan. Dalam hal ini, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem telah melibatkan pengurus RT/RW dengan bantuan kader relawan, seperti KSH. Dengan bantuan kader KSH, pengurus RT/RW dapat terbantu dalam mengusulkan orang-orang yang layak untuk masuk ke data Keluarga Miskin dan mendapatkan bantuan. Kader KSH yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem juga membantu mendampingi jika tim survey dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain kader KSH, ada juga petugas Bank Jatim yang membantu dalam pembagian dana. Petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi

kepada Lurah atau Camat untuk disampaikan kepada pengurus RT/RW danarganya. Sehingga dengan demikian peneliti menemukan adanya komunikasi yang kurang antara Dinas Sosial, Kelurahan dan pengurus RT/RW. Hal ini juga berdampak pada bagaimana masyarakat memahami bantuan yakni BLT yang diberikan oleh pemerintah. **Ketiga**, Pengurus RT/RW dan Kelurahan tidak hanya kurang mengetahui BLT Pemerintah Kota, tetapi mereka juga tidak mengetahui data penerima BLT yang diberikan. Karena Dinas Sosial Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) yang menetapkan keluarga miskin yang menerima. Penerima BLT dari Pemerintah Kota Surabaya adalah keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan apapun sebelumnya dan telah terdaftar di aplikasi Si Keluarga Miskin milik Pemerintah Kota Surabaya. Sehubungan dengan data keluarga miskin yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, hanya unit pelaksana teknis Dinas Sosial Kota Surabaya yang dapat mengakses aplikasi tersebut. Pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan hanya dapat membantu warga dalam pendaftaran SKKM (Surat Keterangan Keluarga Miskin). Jika data dari Dinas Sosial sudah ada, seharusnya sudah valid. Namun, ada beberapa data tidak tepat sasaran dan mendapatkan bantuan ganda. sehingga perlu pendataan ulang. Ketika hal tersebut terjadi, pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui kriteria penilaian yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan penerima bantuan. Ketika peneliti meminta data penerima BLT kepada pihak Kelurahan Klampis Ngasem, ternyata data yang diterima peneliti dari Kelurahan tidak sinkron dengan data yang diterima dari Dinas Sosial. Hal ini terjadi karena data dari Dinas Sosial tidak transparan kepada aparat yang membantu, seperti Kelurahan dan pengurus RT/RW. Untuk memastikan data penerima BLT sesuai dengan kriteria, koordinasi data antara Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW seharusnya sangat diperlukan. **Keempat**, selain bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota Surabaya juga didukung oleh beberapa pihak lain termasuk KSH dan Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran dana bantuan. Dalam hal ini, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem telah melibatkan pengurus RT/RW dengan bantuan kader relawan, seperti KSH. Dengan bantuan kader KSH, pengurus RT/RW dapat terbantu dalam mengusulkan orang-orang yang layak untuk masuk ke data Keluarga Miskin dan mendapatkan bantuan. Kader KSH yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem juga membantu mendampingi jika tim survey dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain kader KSH, ada juga petugas Bank Jatim yang membantu dalam pembagian dana. Petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi

yang jelas dan layanan mereka tidak berbelit. Proses dalam pengambilan dana bantuan juga cukup mudah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sudah terlaksana dengan baik. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya menjadi aturan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai agar tertib, adil, dan tepat sasaran. Masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem menyambut dengan antusiasme yang sangat tinggi dan berharap BLT akan terus diberikan secara konsisten untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tidak hanya memberikan BLT saja, namun Pemerintah Kota Surabaya juga mengimbangi dengan Program Padat Karya. Di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya masih kurang pengetahuan mengenai BLT Pemerintah Kota dan Program Padat Karya karena tidak ada sosialisasi dan pemahaman mengenai hal tersebut. Pada level mikro menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa bergantung pada bantuan yang mengakibatkan masyarakat tidak ada keinginan untuk lepas dari bantuan atau mandiri. Pada level meso menunjukkan bahwa lembaga dan aparatur terkait seperti Dinas Sosial, Kelurahan dan Pengurus RT/RW masih kurang komunikasi mengenai BLT Pemerintah Kota yang berdampak apada pemahaman masyarakat pada BLT Pemerintah Kota yang diberikan. Pada level makro menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara masih kurang melakukan transparansi data dan kriteria penerima BLT dengan aparat pembantu mulai dari Kelurahan dan Pengurus RT/RW. Pemberian BLT Pemerintah Kota telah menciptakan budaya ketergantungan pada bantuan dan budaya tersebut telah menyebar luas di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sehingga masyarakat tidak akan berhenti bergantung dan kurang berinisiatif serta mandiri dalam mengembangkan diri mereka. Meskipun telah memberikan manfaat, Dinas Sosial harus mengadakan rapat evaluasi rutin setiap triwulan sekali dengan Kecamatan, Kelurahan, serta RT dan RW untuk memastikan ketepatan sasaran, mencegah pemberian ganda, dan mengatasi masalah dalam pelaksanaan. Kelurahan Klampis Ngasem perlu mengembangkan platform resmi untuk sosialisasi dan pengajuan BLT Pemerintah Kota dan Program Padat Karya. Mereka juga perlu melakukan sosialisasi dengan bantuan KSH di acara pertemuan warga.

DAFTAR REFERENSI

- Haudi. (2021). *Kebijakan Publik* (Hadion Wijoyo, Ed.). Insan Cendekia Mandiri.
- Melati Putri Arsika. (2024, January 6). *5 Jenis Bansos 2024 Bakal Cair! Cek Nama Penerima di Link Ini*. Detiksumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7127711/5-jenis-bansos-2024-bakal-cair-cek-nama-penerima-di-link-ini>
- Pramanik, N. D. (2020). *DAMPAK BANTUAN PAKET SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT PADALARANG PADA MASA PANDEMI COVID 19*.
- Salahudin. (2019). *Narrative Policy Framework*.
- Salim, H. (2023). Fenomena Urbanisasi Kota Surabaya (Studi Pertambahan Penduduk Berusia Muda). *Prosiding Seminar Nasional*, 938–946.

Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Narrative Policy Framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

by Emmy Dyah Rahmawati

Submission date: 12-Jun-2024 09:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2400791633

File name: EKSEKUSI_Vol_2_no_3_Agust_2024_hal_300-313.pdf (1.12M)

Word count: 4803

Character count: 30904



Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Narrative Policy Framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

Emmy Dyah Rahmawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Sukofilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: emmydyahrahmawati@gmail.com

Abstract. The Government of Surabaya has empowered by providing Direct Cash Assistance (BLT) in accordance with the Regulations of the Mayor of Surabaya No. 130 Year 2023 on the Implementation of Direct Cash Aid to the Poor Families in the City of Surabaya through Jatim Bank and has been implemented in Klampis Ngasem Village of Surabaya, but many still do not know about the BLT of the Government of this city. As a result, the implementation of the BLT is still unclear. The research uses Shanahan Narrative Policy Framework (NPF) Theory and descriptive qualitative methods with an approach through observations, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the BLT in Klampis Ngasem Village Surabaya has been well carried out and was welcomed by the very high enthusiasm of the community. However, in Klampis Ngasem Village there is still a lack of knowledge about the BLT and the Solid Work Program because there is no socialization about it. At the micro level, societies are used to relying on help so there is no desire to be independent and difficult to move towards prosperity. At the meso level, there is still a lack of communication about the BLT of the City Government between the institutions and the related apparatus that affects public understanding. At the macro level, the lack of transparency of the data and the criteria of the recipient by the agency on the relevant apparatus. The City Government also created a culture of dependence on aid in Klampis Ngasem Village Surabaya.

Keywords: Analysis, BLT, NPF

Abstrak. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya melalui Bank Jatim dan sudah terlaksana di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya, namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai BLT Pemerintah Kota ini. Akibatnya pelaksanaan BLT masih belum jelas. Penelitian ini menggunakan Teori Narrative Policy Framework (NPF) menurut Shanahan dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan BLT di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan disambut antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Program Padat Karya juga ditawarkan sebagai penyeimbangannya. Namun, di Kelurahan Klampis Ngasem masih kurang pengetahuan mengenai BLT dan Program Padat Karya karena tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut. Pada level mikro masyarakat sudah terbiasa bergantung pada bantuan sehingga tidak ada keinginan untuk mandiri dan sulit digerakkan menuju kemakmuran. Pada level meso masih terjadi kurangnya komunikasi mengenai BLT Pemerintah Kota antara lembaga dan aparatur terkait yang berdampak pada pemahaman masyarakat. Pada level makro terjadi kurangnya transparansi data dan kriteria penerima oleh lembaga pada aparatur terkait. BLT Pemerintah Kota juga menciptakan budaya ketergantungan pada bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

Kata kunci: Analisis, BLT, NPF

Received Mei 10, 2024; Accepted Juni 12, 2024; Published Agustus 31, 2024

* Emmy Dyah Rahmawati, emmydyahrahmawati@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemasalahan publik di Indonesia saat ini sangat beragam dari berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah masyarakat yang sering kali menjadi sorotan adalah PMKS, sebuah isu yang terus menerus muncul di Indonesia. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah sekelompok individu yang mengalami rintangan, kesukaran, atau gangguan yang mencegah mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam fungsi-fungsi sosialnya, menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Kendala-kendala ini meliputi kemiskinan, pengabaian, cacat, kerugian sosial, keterbelakangan, isolasi, dan dampak negatif perubahan lingkungan, seperti bencana alam. Pemerintah terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut secara tuntas. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan mendistribusikan bantuan sosial. Bantuan Sosial (bansos) pemerintah kembali diberikan kepada masyarakat. Penerima bantuan sosial menerima dukungan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka (Melati Putri Arsika, 2024). Ada banyak jenis bantuan sosial yang diberikan, seperti PKH, BLT El Nino, Beras, BPNT, dan PIP.

Kota Surabaya merupakan contoh kemajuan di Provinsi Jawa Timur yang sering menjadi inspirasi untuk kemajuan di wilayah lain. Kota Surabaya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, menarik penduduk dari seluruh dunia untuk tinggal. Kota Surabaya memberikan kontribusi terbesar terhadap kepadatan penduduk Jawa Timur, provinsi terpadat kedua di Indonesia (Salim, 2023). Oleh karena itu, arus urbanisasi yang berlebihan terjadi di kota besar seperti Surabaya dan dapat menyebabkan masalah yang serius seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Kota Surabaya dianggap sebagai salah satu yang paling serius menangani masalah kesejahteraan sosial PMKS utama ini, khususnya pada kategori Keluarga Miskin yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga, Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan PMKS khususnya Keluarga Miskin juga dilakukan dengan memberikan bantuan sosial **salah satunya** yaitu **Bantuan Langsung Tunai**. **Bantuan Langsung Tunai** juga dikenal dengan sebutan BLT adalah bantuan sosial dengan memberikan uang kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya. Bantuan Langsung Tunai ini dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya**.

Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kota diberikan sebesar Rp200.000 setiap bulan. Faktanya, sejak awal tahun 2024 bantuan langsung tunai ini diberikan kepada keluarga miskin di Kota Surabaya yang belum pernah menerima bantuan sosial. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat dapat berkembang dan sejahtera. Daftar penerima BLT merupakan warga yang masuk ke dalam data keluarga miskin Pemerintah Kota Surabaya. Selain masuk ke dalam data keluarga miskin, penerima BLT ini tidak dapat menerima bantuan sosial ganda. Distribusi Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bank Jatim dan menerbitkan *Virtual Account* kepada penerima bantuan. Dinas Sosial Kota Surabaya memastikan Bantuan Langsung Tunai ini telah disalurkan ke 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya.

Diantara 31 kecamatan di Kota Surabaya yang menjadi titik penyebaran Bantuan Langsung Tunai ini adalah Kecamatan Sukolilo. Kecamatan ini membawahi beberapa kelurahan yang menjadi bagian administratifnya yaitu antara lain Kelurahan Semolowaru, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Menur Pumpungan, Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Medokan Semampir, dan Kelurahan Keputih. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu di Kelurahan Klampis Ngasem.

Tabel 1. Data Penerima BLT Pemerintah Kota Kelurahan Klampis Ngasem

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	67
2	Februari	28
3	Maret	19
4	April	19

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024

Peneliti menemukan masih banyak orang di Kelurahan Klampis Ngasem belum mengetahui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota yang berlaku mulai awal tahun 2024. Akibatnya pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai di Kelurahan Klampis Ngasem masih belum jelas. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bantuan langsung tunai menggunakan narrative policy framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Menurut ahli, istilah "kebijakan publik" dan "kebijakan" memiliki banyak arti. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 04 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah menetapkan istilah-istilah

membantu penyinkronan data keluarga miskin mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan mendata keluarga miskin agar bantuan pemerintah dapat diberikan dengan tepat, efektif, dan efisien.

Gambar 1. Halaman Beranda Aplikasi Si Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Surabaya



Sumber : Google, 2024

Aplikasi ini dapat ³⁷ digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program bantuan yang telah dilaksanakan. Penting untuk dijaga kerahasiaan data yang dimasukkan dalam aplikasi ini, sehingga data yang terus diperbarui akan terjamin dan tidak disalahgunakan. Menurut keterangan dari pihak Dinas Sosial, aplikasi Si Keluarga Miskin ini hanya bisa diakses oleh UPT (Dinas Sosial Kota Surabaya). Dalam pelaksanaan pemberian BLT, data nama – nama usulan dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan oleh pihak Dinas Sosial dimasukkan ke dalam aplikasi Si Keluarga Miskin dan diverifikasi dengan melakukan survey lapangan. Hasil survey tersebut diolah datanya dengan rumus PMT (*Proxy Means Test*) yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, sehingga penetapan penerima BLT dilakukan secara *by system*. Kepala Dinas akan memvalidasi penerima BLT dan pihak Dinas Sosial akan memberikan undangan kepada masyarakat yang menerima untuk pengambilan BLT. Undangan tersebut disalurkan melalui Kelurahan untuk disampaikan kepada RT/RW setempat kemudian diberikan ke warga penerima manfaat. Warga akan datang ke tempat pengambilan BLT ³⁵ sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Bank Jatim dalam penyaluran. Dinas Sosial akan memberikan dana yang akan diberikan sesuai jumlah penerima yang ada di data penerima BLT tersebut. Data penerima dari Dinas Sosial juga diberikan kepada Bank Jatim untuk dikeluarkan kode *Virtual Account* tiap penerima. Ketika pengambilan, penerima manfaat memberikan undangan yang telah diterima ke petugas Bank Jatim yang kemudian akan di cek kembali dengan data dari Dinas Sosial. Jika sudah sesuai, petugas akan memproses penarikan dana bantuan tersebut, tanda tangan dan foto sebagai bukti bahwa warga tersebut telah menerima bantuan.

Gambar 2. Penyaluran BLT oleh Petugas Bank Jatim



Sumber: Pemerintah Kota Surabaya, Google, 2024

1. Konstruksi Sosial

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), konstruksi sosial merupakan bagian yang paling penting. Karena konstruksi sosial ini dilakukan dengan membangun interaksi dan komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan. Tujuannya agar informasi mengenai kebijakan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi sosial pada pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem belum dilaksanakan. Pada pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dapat ditemukan bahwa tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait BLT Pemerintah Kota yang sedang disalurkan saat ini. Sehingga pemahaman informasi mengenai BLT ini oleh masyarakat masih sangat minim. Masyarakat hanya mengetahui ketika diberi undangan pengambilan BLT, mereka menjadi salah satu penerima manfaat yang terpilih. Lain hal mengenai BLT ini mereka tidak mengetahuinya. Meskipun minim informasi mengenai BLT yang diberikan, masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem sangat bergantung pada bantuan ini. Ketergantungan masyarakat ini mengakibatkan terjadinya aksi protes jika bantuan tidak mereka terima. Pihak RT/RW memberi penjelasan bahwa BLT diberikan secara bertahap dan jika ada warga yang layak menerima tetapi belum menerima akan diusulkan kembali. Namun keputusan akhir penerima ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Dinas Sosial) Kota Surabaya.

2. Relatifitas yang Terikat

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), **relatifitas yang terikat** merupakan bagian dari konstruksi sosial yang direalisasikan. Relatifitas yang terikat digunakan untuk melihat realitas tentang adanya kebijakan yang sedang diterapkan. Realitas tersebut ada hubungan antara tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, realitas yang ada

dapat dilihat dari tujuan pemerintah dengan memberikan BLT akan menurunkan tingkat kemiskinan dan akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sebagai pendampingnya pemerintah juga menawarkan Program Padat Karya untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Namun, program pelatihan ini ditolak oleh banyak masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem yang pengangguran dan masuk ke dalam keluarga miskin. Mereka menolak karena berbagai alasan dan takut sebelum memulai. Mereka hanya memilih untuk bergantung pada bantuan pemerintah termasuk BLT ini. Masyarakat memprotes jika tidak menerima bantuan tanpa mengetahui bahwa data penerima yang ada di Kelurahan dan RT/RW berasal dari Dinas Sosial. Terkait data penerima, realitas yang terjadi terdapat ketidaksinkronan data antara data dari Kelurahan Klampis Ngasem dan data dari Dinas Sosial yang memungkinkan data tersebut bukan data penerima BLT Pemerintah Kota namun jenis BLT yang lain.

3. Elemen – elemen yang Terstruktur

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), elemen – elemen terstruktur yang bersifat umum dirumuskan secara spesifik dan dapat diidentifikasi. Elemen – elemen yang terstruktur merupakan bagian dari pelaksana kebijakan. Elemen – elemen yang terstruktur mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Mulai dari tingkat yang paling atas hingga bawah. Pada pelaksanaan BLT Pemerintah Kota, Pemerintah Kota Surabaya dengan bantuan berbagai pihak terkait seperti Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, KSH (Kader Surabaya Hebat), serta Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran BLT. Di Kelurahan Klampis Ngasem, pihak Kelurahan dan RT/RW telah dilibatkan dengan dibantu oleh Kader KSH yang turun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui keadaan masyarakat secara nyata. Kader – kader ini yang membantu untuk mendampingi jika tim survei dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain KSH, ada petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi yang jelas dan layanan mereka tidak rumit. Proses pengambilan juga cukup mudah.

4. Level Analisis

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019) analisis dalam *Narrative Policy Framework* (NPF) terdapat 3 (tiga) level, yaitu mikro (individu), meso (group), dan makro (budaya dan institusi).

4.1 Level Mikro

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level mikro fokus penelitian

pada pertanyaan bagaimana individu membuat narasi dan dibentuk oleh narasi. Artinya, fokus utama dalam penelitian tingkat ini yaitu adanya narasi yang diciptakan dan dampak yang ditimbulkan dalam memengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Narasi dalam hal ini adalah deskripsi atau penjelasan mengenai suatu kebijakan. Kebijakan dalam penelitian ini yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian karena memang tidak ada sosialisasi mengenai BLT Pemerintah Kota Surabaya dan pengetahuan mendalam mengenai Program Padat Karya yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, orang-orang yang menerima BLT dan bantuan lain di Kelurahan Klampis Ngasem sebagian besar tidak dapat diajak untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Karena telah ketergantungan mereka pada BLT, Program Padat Karya yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota ditolak, mereka bergantung pada bantuan saja dan tidak mau berusaha. Akibatnya, tidak ada keinginan untuk lepas dari bantuan atau mandiri. Pemerintah selalu berusaha mendorong, menggerakkan dan membantu mereka keluar dari taraf hidup yang tidak layak. Namun, hanya sebagian masyarakat yang dapat diajak dan digerakkan menuju kemakmuran. Meskipun di sisi lain mereka setuju dengan tujuan pemerintah dan BLT yang diberikan sesuai dengan harapan.

4.2 Level Meso

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level meso penelitian fokus pada bagaimana aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narrative kepada proses kebijakan yang berpengaruh. Artinya, penelitian dalam tingkat ini berfokus pada bagaimana aktor – aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narasi (penjelasan) yang bertujuan untuk memengaruhi proses kebijakan yang sedang berlangsung. Level meso dalam penelitian ini berkaitan dengan *interest group* atau orang – orang yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan. *Group* atau orang – orang yang dimaksud tersebut dalam penelitian ini adalah Pengurus Kelurahan, RW, RT, Kader KSH, dan Petugas Bank Jatim yang membantu dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mereka bekerja sama untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial, Kelurahan, dan Pengurus RT/RW. Pengurus RT/RW mengakui bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh Kelurahan tentang BLT Pemerintah Kota ini. Pihak Kelurahan Klampis Ngasem juga kurang mengetahuinya. Namun pihak Dinas Sosial mengatakan mengatakan bahwa camat dan lurah telah diberitahu tentang

BLT ini sehingga mereka dapat memberi tahu pengurus RT/RW dan masyarakatnya. Ini juga berdampak pada bagaimana warga memahami BLT yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

4.3 Level Makro

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), pada level makro penelitian mengolaborasi pertanyaan riset bagaimana perubahan atau stabilitas kebijakan dalam konteks budaya dan institusi politik. Artinya, penelitian ini berfokus pada pemahaman bagaimana suatu kebijakan dapat berubah atau tetap stabil dengan mempertimbangkan budaya dan institusi yang ada. Level makro pada penelitian ini berkaitan dengan lembaga atau institusi yang mengeluarkan dan menerapkan kebijakan, serta budaya yang diciptakan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, lembaga atau institusi yang dimaksud adalah Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan dan melaksanakan pemberian BLT serta budaya yang tercipta akibat adanya BLT ini dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Surabaya masih kurang koordinasi serta transparansi mengenai data dan kriteria penerima BLT. Karena pada kenyataannya masih ada yang menerima bantuan ganda dan tidak tepat sasaran ketika undangan pengambilan BLT dibagikan. Pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam data penerima bantuan. Mereka juga tidak mengetahui kriteria yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya ketergantungan bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem telah mereajalela. Masyarakat tidak akan berhenti bergantung. Sehingga pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika bantuan ini diberikan secara konsisten, agar masyarakat juga terdorong untuk mandiri, kreatif dan inovatif.

5. Narrative

Menurut Shanahan dalam (Salahudin, 2019), narrative dipahami untuk memposisikan peran pengetahuan manusia, komunikasi. Narrative dalam *Narrative Policy Framework (NPF)* ini merupakan bagian dari pendeskripsian temuan – temuan mengenai suatu kebijakan menjadi sebuah cerita. Bagian narrative dalam penelitian ini akan mendiskripsikan dan menceritakan beberapa temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan beberapa fakta yang ada di lapangan. **Pertama**, Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Kota telah tersalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya dan mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat Klampis Ngasem. Antusias yang berlebih membuat mereka juga merasa bergantung pada BLT yang diberikan. Masyarakat mengharapkan bantuan tunai seperti ini akan diberikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka yang panjang oleh pemerintah di setiap bulannya. Karena dengan bantuan ini mereka juga akan mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan misi dan tujuannya dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam mengimbangi adanya BLT, pemerintah juga menawarkan Program Padat Karya. Karena untuk mewujudkan misi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan maka pengangguran juga harus dihapuskan. Di Kelurahan Klampis Ngasem Program Padat Karya telah ditawarkan kepada masyarakat tetapi banyak yang menolak dan tidak tertarik dengan program pelatihan ini karena berbagai alasan. Dibandingkan harus mengikuti program pelatihan, masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan bantuan saja. Mereka tetap memilih menunggu **mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membantu perekonomian mereka**. Sehingga melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang masuk kategori keluarga miskin terlebih lagi mendapatkan bantuan tunai belum bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Surabaya yang sejahtera tanpa adanya kemiskinan yang berkepanjangan. Masih sebagian saja masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya yang bisa diajak dan digerakkan menuju kehidupan yang makmur. Hal itu dikarenakan mereka telah ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, akibatnya tidak mempunyai keinginan untuk mandiri. Budaya ketergantungan bantuan di Kelurahan Klampis Ngasem telah merajalela. **Kedua**, masyarakat Klampis Ngasem tidak mengetahui hakekat dari BLT yang diberikan. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup tentang BLT dan hanya mengetahui bahwa mereka merupakan bagian dari penerima BLT. Menurut fakta di lapangan ini disebabkan karena bahwa tidak ada sosialisasi tentang BLT Pemerintah Kota yang diberikan di Kelurahan Klampis Ngasem. Saat tidak ada sosialisasi seperti ini, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dan merasa bahwa mereka seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah melakukan protes. Walaupun mereka melakukan aksi protes, pengurus RT/RW juga tidak mengetahui tentang data penerima BLT. Namun setelah melakukan penelitian, ternyata aparaturnya sendiri termasuk pengurus RT, RW, dan Lurah, tidak mengetahui banyak tentang BLT ini. Sebaliknya, Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa BLT Pemerintah Kota yang sedang diberikan telah diberitahukan

kepada Lurah atau Camat untuk disampaikan kepada pengurus RT/RW danarganya. Sehingga dengan demikian peneliti menemukan adanya komunikasi yang kurang antara Dinas Sosial, Kelurahan dan pengurus RT/RW. Hal ini juga berdampak pada bagaimana masyarakat memahami bantuan yakni BLT yang diberikan oleh pemerintah. **Ketiga**, Pengurus RT/RW dan Kelurahan tidak hanya kurang mengetahui BLT Pemerintah Kota, tetapi mereka juga tidak mengetahui data penerima BLT yang diberikan. Karena Dinas Sosial Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) yang menetapkan keluarga miskin yang menerima. Penerima BLT dari Pemerintah Kota Surabaya adalah keluarga miskin yang belum pernah menerima bantuan apapun sebelumnya dan telah terdaftar di aplikasi Si Keluarga Miskin milik Pemerintah Kota Surabaya. Sehubungan dengan data keluarga miskin yang ada di aplikasi Si Keluarga Miskin, hanya unit pelaksana teknis Dinas Sosial Kota Surabaya yang dapat mengakses aplikasi tersebut. Pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan hanya dapat membantu warga dalam pendaftaran SKKM (Surat Keterangan Keluarga Miskin). Jika data dari Dinas Sosial sudah ada, seharusnya sudah valid. Namun, ada beberapa data tidak tepat sasaran dan mendapatkan bantuan ganda. sehingga perlu pendataan ulang. Ketika hal tersebut terjadi, pihak Kelurahan dan pengurus RT/RW tidak mengetahui kriteria penilaian yang digunakan oleh Dinas Sosial untuk menentukan penerima bantuan. Ketika peneliti meminta data penerima BLT kepada pihak Kelurahan Klampis Ngasem, ternyata data yang diterima peneliti dari Kelurahan tidak sinkron dengan data yang diterima dari Dinas Sosial. Hal ini terjadi karena data dari Dinas Sosial tidak transparan kepada aparat yang membantu, seperti Kelurahan dan pengurus RT/RW. Untuk memastikan data penerima BLT sesuai dengan kriteria, koordinasi data antara Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW seharusnya sangat diperlukan. **Keempat**, selain bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota Surabaya juga didukung oleh beberapa pihak lain termasuk KSH dan Bank Jatim yang bertindak sebagai bank pembantu dalam penyaluran dana bantuan. Dalam hal ini, pelaksanaan BLT Pemerintah Kota di Kelurahan Klampis Ngasem telah melibatkan pengurus RT/RW dengan bantuan kader relawan, seperti KSH. Dengan bantuan kader KSH, pengurus RT/RW dapat terbantu dalam mengusulkan orang-orang yang layak untuk masuk ke data Keluarga Miskin dan mendapatkan bantuan. Kader KSH yang ada di Kelurahan Klampis Ngasem juga membantu mendampingi jika tim survey dari Dinas Sosial mengunjungi masyarakat yang diusulkan. Selain kader KSH, ada juga petugas Bank Jatim yang membantu dalam pembagian dana. Petugas Bank Jatim sangat membantu masyarakat dalam pencairan dana BLT karena mereka memiliki instruksi

yang jelas dan layanan mereka tidak berbelit. Proses dalam pengambilan dana bantuan juga cukup mudah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sudah terlaksana dengan baik. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya menjadi aturan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai agar tertib, adil, dan tepat sasaran. Masyarakat di Kelurahan Klampis Ngasem menyambut dengan antusiasme yang sangat tinggi dan berharap BLT akan terus diberikan secara konsisten untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tidak hanya memberikan BLT saja, namun Pemerintah Kota Surabaya juga mengimbangi dengan Program Padat Karya. Di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya masih kurang pengetahuan mengenai BLT Pemerintah Kota dan Program Padat Karya karena tidak ada sosialisasi dan pemahaman mengenai hal tersebut. Pada level mikro menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa bergantung pada bantuan yang mengakibatkan masyarakat tidak ada keinginan untuk lepas dari bantuan atau mandiri. Pada level meso menunjukkan bahwa lembaga dan aparaturnya terkait seperti Dinas Sosial, Kelurahan dan Pengurus RT/RW masih kurang komunikasi mengenai BLT Pemerintah Kota yang berdampak apada pemahaman masyarakat pada BLT Pemerintah Kota yang diberikan. Pada level makro menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara masih kurang melakukan transparansi data dan kriteria penerima BLT dengan apatur pembantu mulai dari Kelurahan dan Pengurus RT/RW. Pemberian BLT Pemerintah Kota telah menciptakan budaya ketergantungan pada bantuan dan budaya tersebut telah menyebar luas di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya sehingga masyarakat tidak akan berhenti bergantung dan kurang berinisiatif serta mandiri dalam mengembangkan diri mereka. Meskipun telah memberikan manfaat, Dinas Sosial harus mengadakan rapat evaluasi rutin setiap triwulan sekali dengan Kecamatan, Kelurahan, serta RT dan RW untuk memastikan ketepatan sasaran, mencegah pemberian ganda, dan mengatasi masalah dalam pelaksanaan. Kelurahan Klampis Ngasem perlu mengembangkan platform resmi untuk sosialisasi dan pengajuan BLT Pemerintah Kota dan Program Padat Karya. Mereka juga perlu melakukan sosialisasi dengan bantuan KSH di acara pertemuan warga.

DAFTAR REFERENSI

- Haudi. (2021). *Kebijakan Publik* (Hadion Wijoyo, Ed.). Insan Cendekia Mandiri.
- Melati Putri Arsika. (2024, January 6). 5 Jenis Bansos 2024 Bakal Cair! Cek Nama Penerima di Link Ini. Detiksumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7127711/5-jenis-bansos-2024-bakal-cair-cek-nama-penerima-di-link-ini>
- Pramanik, N. D. (2020). *DAMPAK BANTUAN PAKET SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT PADALARANG PADA MASA PANDEMI COVID 19*.
- Salahudin. (2019). *Narrative Policy Framework*.
- Salim, H. (2023). Fenomena Urbanisasi Kota Surabaya (Studi Pertambahan Penduduk Berusia Muda). *Prosiding Seminar Nasional*, 938–946.

Analisis Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Narrative Policy Framework di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	4%
2	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	3%
3	asia.legalcentric.com Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	aksiologi.org Internet Source	1%
6	dataku.sidoarjokab.go.id Internet Source	1%
7	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1%
8	www.detik.com Internet Source	1%
9	www.vulhm.cz Internet Source	<1%

- | | | |
|----|--|------|
| 10 | jdih.surabaya.go.id
Internet Source | <1 % |
| 11 | Lestari Kurniawati. "DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK: ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI INDONESIA", INFO ARTHA, 2017
Publication | <1 % |
| 12 | Mubarok, Laeli. "Implementasi penilaian autentik kurikulum 2013 di MI Maarif NU Karangdadap kecamatan Kalibagor kabupaten Banyumas", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024
Publication | <1 % |
| 13 | www.kabarjagad.id
Internet Source | <1 % |
| 14 | digilib.unila.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 15 | etd.repository.ugm.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 16 | jurnalku.org
Internet Source | <1 % |
| 17 | Nadia Oktaviani Bangun, Suryani Suryani, Fitri Raya. "Implementasi Program Bansos Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sentul Kabupaten Tangerang", | <1 % |

Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, 2022

Publication

18	<p>Farmin Yusuf, Saleh Hamid, Sastro M Wantu, Udin Hamim. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO PADA MASA PANDEMI COVID-19", Jambura Journal Civic Education, 2023</p> <p>Publication</p>	<1 %
19	<p>Submitted to University of North Georgia</p> <p>Student Paper</p>	<1 %
20	<p>bajangjournal.com</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
21	<p>jurnal.um-tapsel.ac.id</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
22	<p>sumarios.org</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
23	<p>jwk.bandung.lan.go.id</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
24	<p>garuda.kemdikbud.go.id</p> <p>Internet Source</p>	<1 %
25	<p>repo.palcomtech.ac.id</p> <p>Internet Source</p>	<1 %

- 26 Kharisma Nur Azizah, Ahmad Khairul Nuzuli, Winda Oktaviana. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin di Nagari Batang Arah Tapan", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2023
Publication <1%
-
- 27 Prayogi Winata, Isabella Isabella, Amaliatul Walidain. "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA MANGGAR RAYA KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN", JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 2023
Publication <1%
-
- 28 Siti Nur Afni, Jamiah Jamiah, Raudah Mahmud. "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser", PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 2021
Publication <1%
-
- 29 banyuputih.desa.id
Internet Source <1%
-
- 30 es.slideshare.net
Internet Source <1%
-

31	id.scribd.com Internet Source	<1 %
32	jurnalekonomi.unisla.ac.id Internet Source	<1 %
33	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
34	nardilbs.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	rezaasus.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	ririni19.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
38	iptek.its.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off